



INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN

DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA SERANG
TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan Pendahuluan Indikator Kinerja Pembangunan (IKP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang Tahun 2024-2025 ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai bentuk evaluasi dan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang komunikasi, informatika, dan persandian, serta untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Serang.

Laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan, sekaligus sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi bagi perbaikan di masa mendatang. Penyusunan laporan ini mengacu pada data sekunder, seperti dokumen resmi, serta kebijakan yang relevan, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang Tahun 2025-2029.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Apresiasi juga kami sampaikan kepada Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Serang atas data statistik yang sangat mendukung proses analisis.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi cakupan data maupun analisis yang disajikan. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang konstruktif untuk perbaikan laporan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, baik bagi Pemerintah Kota Serang maupun bagi masyarakat luas, serta menjadi pijakan dalam mewujudkan visi Kota Serang menjadikan Kota

Serang yang madani, maju kotanya bahagia dan sejahtera
warganya.

Serang, Desember 2025
Kepala Diskominfo Kota Serang

TTD

Asep Setiawan, S.Sos, M.Si.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud, Tujuan, Sasaran, Target dan Keluaran.....	4
1.3. Landasan Hukum	8
1.4. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN UMUM INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN.....	14
2.1. Tinjauan Umum Kinerja.....	14
2.1. Indikator Kinerja Pembangunan.....	18
BAB III METODE PENELITIAN	25
3.1. Pendekatan Penelitian	25
3.2. Metode Pengumpulan Data	27
3.3. Populasi Dan Sampel Penelitian	28
3.3.1. Populasi dan Sampel Rumah Tangga	29
3.3.2. Populasi Kecamatan	31
3.3.3. Populasi Perangkat Daerah (PD).....	31
3.4. Teknik Analisis Data Penelitian	32
3.4.1. Uji Coba Instrumen	32
3.4.2. Pelatihan Petugas Lapangan (Enumerator)	33
3.4.3. Pelaksanaan Survei.....	34
3.4.4. Pelaksanaan Survei.....	34

BAB IV PEMBAHASAN.....	36
4.1. Deskripsi Objek Penelitian.....	36
4.2. Deskripsi Data Penelitian	43
4.2.1. Sampel Rumah Tangga.....	47
4.2.2. Sampel Kecamatan	48
4.2.3. Sampel Perangkat Daerah (PD).....	50
4.3. Analisis Berdasarkan Bidang Urusan.....	126
4.3.1. Bidang Statistik	126
4.3.2. Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika.....	126
4.4. Analisis Tren Kinerja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).....	128
4.5. Evaluasi Implementasi Kota Cerdas (Smart City).....	131
4.6. Kinerja Informasi dan Komunikasi Publik (IKP).....	135
4.7. Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Persandian	137
SIMPULAN DAN SARAN	139
5.1. Simpulan.....	139
5.2. Saran	141
DAFTAR PUSTAKA.....	144

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Serang memegang peranan strategis dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berbasis teknologi informasi, persandian, dan komunikasi. Prinsip Good Governance menjadi landasan utama dalam pelaksanaan tugas ini, yang mencakup profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Implementasi prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua kebijakan dan program Diskominfo dapat memberikan dampak yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat. Dengan semakin berkembangnya teknologi dan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat terhadap layanan digital, peran Diskominfo semakin penting sebagai ujung tombak dalam membangun ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan.

Sebagai bagian dari tanggung jawab terhadap visi Kota Serang yaitu Menjadikan Kota Serang Madani yang Maju Kotanya, Bahagia dan Sejahtera Warganya, Diskominfo juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas tata kelola yang sejalan dengan Prinsip Good Governance. Hal ini mencakup penguatan akuntabilitas dalam pengelolaan data, peningkatan transparansi dalam pengambilan keputusan berbasis teknologi, dan efisiensi dalam pelayanan publik di berbagai sektor, Diskominfo

dituntut untuk menyusun dan mengevaluasi indikator kinerja pembangunan (IKP) yang relevan, terukur, dan berbasis data. Penyusunan IKP ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang diimplementasikan telah berjalan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang Tahun 2025-2029.

Indikator Kinerja Pembangunan yang disusun oleh Diskominfo Kota Serang mencakup tiga bidang utama, yaitu, dengan analisis relevansi terkini yang mencerminkan kebutuhan masyarakat modern dan perubahan prioritas strategis berdasarkan data terbaru. Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa indikator tetap selaras dengan perkembangan teknologi, tantangan global, dan kebutuhan lokal.

1. Komunikasi dan Informatika: Fokus pada peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan komunikasi serta pemanfaatan teknologi informasi di seluruh wilayah Kota Serang.
2. Persandian: Meningkatkan keamanan informasi dan tata kelola data yang transparan, akuntabel, dan melindungi privasi masyarakat.
3. Penguatan Pemberdayaan Informasi Publik: Melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan informasi.

Laporan ini disusun berdasarkan data primer yang dikumpulkan melalui survei langsung menggunakan kuesioner pada rumah tangga, perangkat

daerah (PD), dan aparat kecamatan di Kota Serang. Data ini kemudian dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya untuk mengevaluasi tren perkembangan kinerja pembangunan di bidang komunikasi, informatika, dan persandian.

Selain itu, indikator kinerja yang diukur memberikan gambaran penting tentang bagaimana Diskominfo mendukung agenda nasional "Satu Data Indonesia". Prinsip Good Governance diwujudkan melalui integrasi data yang lebih baik, mengurangi duplikasi, dan memastikan bahwa data yang tersedia dapat digunakan untuk perencanaan strategis secara efisien. Diskominfo Kota Serang tidak hanya berperan sebagai pengelola data, tetapi juga sebagai fasilitator yang mendorong sinergi antar perangkat daerah untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas maksimal.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, penyusunan laporan akhir Indikator Kinerja Pembangunan (IKP) ini bertujuan untuk:

1. Memberikan gambaran capaian Diskominfo dalam mencapai target-target yang ditetapkan dalam RPJMD 2025-2029.
2. Menyediakan bahan evaluasi untuk perencanaan dan pengambilan kebijakan di tahun mendatang.
3. Memastikan keselarasan antara kebijakan Diskominfo dengan visi pembangunan Kota Serang.

Dengan demikian, laporan ini diharapkan menjadi acuan utama bagi Pemerintah Kota Serang dan pemangku kepentingan lainnya dalam memahami capaian serta tantangan yang dihadapi Diskominfo. Tantangan utama yang dihadapi tahun sebelumnya mencakup pemerataan infrastruktur digital, terutama di kecamatan dengan akses terbatas; memastikan keamanan data di tengah ancaman siber yang semakin kompleks; serta meningkatkan literasi digital masyarakat untuk mendukung adopsi teknologi secara lebih luas. Selain itu, koordinasi antar perangkat daerah dalam implementasi kebijakan 'Satu Data Indonesia' juga membutuhkan peningkatan agar data yang tersedia lebih akurat dan dapat digunakan untuk perencanaan strategis.

1.2.Maksud, Tujuan, Sasaran, Target dan Keluaran

a. Maksud dan Tujuan

Penyusunan laporan Indikator Kinerja Pembangunan (IKP) Diskominfo Kota Serang Tahun 2025 memiliki peran penting dalam memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan di sektor komunikasi, informatika, dan persandian. Laporan ini tidak hanya menjadi alat ukur keberhasilan program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen analisis untuk menilai efektivitas strategi, kebijakan, serta pemanfaatan anggaran yang dikelola oleh perangkat daerah. Dengan adanya laporan IKP, proses evaluasi dapat

dilakukan secara lebih terarah sehingga penyusunan perencanaan di tahun berikutnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan aktual serta dinamika perkembangan teknologi yang semakin cepat.

Adapun tujuan dari dibuatnya laporan indikator kinerja Pembangunan Diskominfo Kota Serang periode tahun 2025 adalah :

1. Menyediakan data dan informasi akurat mengenai capaian kinerja Diskominfo dalam mendukung tata kelola pemerintahan berbasis teknologi.
2. Mengevaluasi tingkat keberhasilan program prioritas Diskominfo pada tahun 2024.
3. Memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan kinerja Diskominfo pada tahun berikutnya.

b. Sasaran

Mengacu pada maksud dan tujuan tersebut di atas, sasaran yang ingin dicapai melalui penyusunan laporan Indikator Kinerja Pembangunan (IKP) ini adalah terwujudnya pemahaman yang lebih komprehensif mengenai indikator kinerja di bidang komunikasi, informatika, dan persandian. Pemahaman ini tidak hanya ditujukan bagi perangkat daerah selaku pelaksana program, tetapi juga bagi masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya yang berkepentingan terhadap perkembangan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi. Dengan adanya pemahaman yang lebih menyeluruh, diharapkan proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program Diskominfo dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.

c. Target

Target dari kegiatan ini adalah tidak hanya tersedianya Data Indikator Kinerja Pembangunan Diskominfo Kota Serang Tahun Anggaran 2025, tetapi juga tersusunnya dokumen resmi yang dapat dijadikan acuan utama dalam penyusunan kebijakan strategis di masa mendatang. Dokumen ini diharapkan mendukung pencapaian RPJMD Kota Serang 2025–2029 serta sejalan dengan agenda nasional “Satu Data Indonesia”, sehingga data yang dihasilkan lebih terstandar, terintegrasi,

dan dapat mendukung proses pengambilan keputusan secara lebih akurat dan efektif.

d. Keluaran

1. Output dari Pekerjaan Penyusunan Data Indikator Kinerja Pembangunan Diskominfo Kota Serang Tahun 2024 yang dilaksanakan pada Anggaran 2025 adalah Tersusunnya data indikator kinerja pembangunan dalam bidang komunikasi, informatika dan persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang.
2. Outcome dari Pekerjaan Penyusunan Data Indikator Kinerja Pembangunan Diskominfo Kota Serang Tahun 2024 yang dilaksanakan pada Anggaran 2025 sebanyak 1 (satu) dokumen.
3. Dokumen laporan akhir Indikator Kinerja Pembangunan (IKP) Diskominfo Kota Serang Tahun 2025.
4. Rekomendasi strategis berbasis data untuk pengambilan kebijakan Diskominfo di tahun mendatang.

1.3.Landasan Hukum

Penetapan Indikator Kinerja Pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang Tahun 2024 yang dilaksanakan pada Anggaran Tahun 2025 berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menegaskan

otonomi daerah sebagai dasar pengaturan pemerintahan daerah, termasuk pengelolaan data dan teknologi informasi oleh Diskominfo.

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten. Memberikan landasan legal terkait pembentukan Kota Serang dan peran Diskominfo sebagai bagian dari struktur pemerintahan.
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Mengatur pentingnya penyelenggaraan statistik sektoral oleh instansi pemerintah untuk mendukung perencanaan pembangunan.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menegaskan statistik sebagai urusan wajib pemerintah daerah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, termasuk bidang komunikasi dan informatika. Undang-undang ini telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Mengatur mekanisme evaluasi kinerja pembangunan oleh instansi pemerintah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Mengatur tata kelola perangkat daerah, termasuk Diskominfo, untuk memastikan pelaksanaan fungsi-fungsi

pemerintahan yang lebih efektif. Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019.

7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Memberikan kerangka kebijakan untuk integrasi data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Mengatur mekanisme perencanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah yang menjadi dasar bagi penyusunan indikator kinerja pembangunan.
9. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Serang Tahun 2008-2025. Menetapkan visi pembangunan jangka panjang Kota Serang, termasuk sektor komunikasi dan informatika.
10. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang. Diubah oleh Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2020 untuk mengatur lebih lanjut struktur organisasi perangkat daerah, termasuk Diskominfo.
11. Peraturan Wali Kota Serang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas

Komunikasi dan Informatika Kota Serang.
Menjelaskan tugas dan fungsi Diskominfo dalam
mendukung tata kelola pemerintahan berbasis
teknologi.

1.4.Sistematika Penulisan

Laporan Indikator Kinerja Pembangunan (IKP) Diskominfo Kota Serang Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang, Maksud, Tujuan, Sasaran, Target, Keluaran, Landasan Hukum, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN

Bab ini berisikan Landasan teori yang meliputi Tinjauan Umum Kinerja dan Indikator Kinerja Pembangunan.

BAB III METODE KAJIAN

Bab ini berisikan metode kajian yang digunakan meliputi Pendekatan Kajian, Metode Pengumpulan Data, Populasi dan Sampel Kajian serta Teknik Analisis Data Kajian.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab pembahasan ini merupakan hasil dari kajian yang meliputi Deskripsi Objek Kajian, Deskripsi Data Kajian, dan Indikator Kinerja Pembangunan Dinas Komunikasi

dan Informatika Kota Serang di Bidang Komunikasi, Informatika, dan Persandian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II TINJAUAN UMUM INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN

2.1. Tinjauan Umum Kinerja

Tinjauan umum kinerja mencakup evaluasi menyeluruh terhadap capaian dan tantangan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Serang dalam penyelenggaraan urusan komunikasi, informatika, dan persandian sepanjang tahun 2024. Proses evaluasi ini menggunakan sejumlah indikator yang dirumuskan untuk menggambarkan efisiensi pelaksanaan program, efektivitas layanan, serta tingkat kesesuaian antara kegiatan Diskominfo dan kebutuhan masyarakat. Melalui indikator tersebut, kinerja tidak hanya dinilai dari aspek administratif, tetapi juga dari dampak nyata yang dirasakan publik..

Berikut indikator kinerja yang digunakan:

1. Aksesibilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK):

Indikator ini mengukur keterjangkauan masyarakat terhadap layanan TIK, baik dari sisi ketersediaan jaringan, pemerataan akses, maupun kemudahan pemanfaatannya. Penilaiannya berfokus pada kemampuan pemerintah menyediakan infrastruktur

dan layanan TIK yang inklusif untuk seluruh wilayah Kota Serang.

2. **Keamanan Informasi:**
Aspek ini menilai sejauh mana sistem keamanan informasi pemerintah daerah mampu melindungi data penting, termasuk kesiapan dalam menghadapi ancaman siber. Termasuk di dalamnya penguatan persandian, pengelolaan data secara aman, serta implementasi prosedur mitigasi risiko keamanan.
3. **Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat:**
Indikator ini memantau tingkat keterlibatan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital, mengikuti program literasi, serta berpartisipasi dalam penyampaian informasi pemerintahan. Hal ini berkaitan dengan upaya Diskominfo untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan digital masyarakat.
4. **Infrastruktur Teknologi dan Layanan Komunikasi:**
Aspek ini mengevaluasi kondisi dan kualitas infrastruktur komunikasi seperti jaringan telekomunikasi, perangkat pendukung layanan publik berbasis digital, dan sarana teknologi lainnya. Penilaian mencakup keberlanjutan pemeliharaan serta kemampuan infrastruktur dalam mendukung kegiatan pemerintah dan masyarakat.
5. **Pemanfaatan Data Terintegrasi (Indikator Baru):**
Indikator ini menilai bagaimana data antar-perangkat daerah mulai diintegrasikan untuk

mendukung perencanaan, monitoring, dan pengambilan keputusan. Kehadiran indikator ini mencerminkan dorongan pemerintah menuju tata kelola data yang lebih terbuka, efisien, dan terpadu.

6. Indeks Literasi Digital Masyarakat Kota Serang (Indikator Baru)

Aspek ini menggambarkan tingkat kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital secara bijak, produktif, dan aman. Penilaiannya meliputi pemahaman dasar digital, keamanan digital, etika bermedia, serta kemampuan memanfaatkan platform digital untuk kebutuhan sehari-hari.

Keseluruhan indikator tersebut memberikan kerangka evaluasi yang komprehensif bagi Diskominfo Kota Serang. Dengan adanya ukuran yang lebih terarah dan berfokus pada kebutuhan nyata masyarakat, hasil evaluasi ini dapat menjadi dasar yang kuat bagi penyusunan strategi dan kebijakan di tahun-tahun berikutnya. Selain itu, data yang dihasilkan dari proses penilaian ini juga berfungsi sebagai referensi penting dalam mengidentifikasi area yang masih perlu diperbaiki maupun peluang pengembangan yang dapat mendukung pencapaian visi pembangunan Kota Serang secara berkelanjutan.

2.1. Indikator Kinerja Pembangunan

Indikator Kinerja Pembangunan (IKP) merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Serang berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai instrumen evaluasi, IKP tidak hanya mengukur capaian secara kuantitatif, tetapi juga melihat kualitas pelaksanaan program, relevansi aktivitas, serta kontribusinya terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, IKP menjadi dasar penting dalam memahami efektivitas kerja organisasi secara menyeluruh.

Selain berfungsi sebagai alat evaluasi, IKP juga berperan sebagai panduan strategis yang memastikan seluruh kebijakan dan langkah operasional Diskominfo tetap sejalan dengan arah pembangunan daerah. Melalui IKP, setiap kegiatan dapat dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi dengan mempertimbangkan apakah aktivitas tersebut mendukung pencapaian visi Kota Serang yang berorientasi pada peningkatan kualitas layanan publik berbasis teknologi informasi. Indikator ini turut membantu memastikan bahwa berbagai program komunikasi, informatika, dan persandian dilaksanakan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi,

serta efektivitas sesuai dengan prinsip Good Governance.

Secara lebih luas, keberadaan IKP memberikan landasan yang kokoh dalam proses pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan baru, dan perencanaan program di tahun-tahun berikutnya. Data dan temuan yang dihasilkan dari IKP menjadi sumber informasi yang sangat penting dalam mengidentifikasi capaian, melihat area yang memerlukan perbaikan, serta memetakan peluang pengembangan sektor komunikasi dan informatika di Kota Serang. Dengan demikian, IKP tidak hanya berfungsi sebagai alat penilaian, tetapi juga sebagai kompas yang mengarahkan pembangunan sektor TIK secara lebih terstruktur, responsif, dan

Indikator yang disusun mencakup tiga bidang utama, yaitu komunikasi, informatika, dan persandian. Ketiga bidang tersebut menjadi dasar penilaian kinerja Diskominfo sehingga proses evaluasi dapat dilakukan secara lebih terarah, terukur, dan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Dengan pembagian indikator yang jelas pada setiap bidang, analisis kinerja dapat menggambarkan kondisi aktual serta menunjukkan area yang perlu ditingkatkan dalam mendukung pelayanan publik dan penguatan tata kelola pemerintahan.

Berikut adalah indikator-indikator yang dipertimbangkan relevan untuk tahun 2025:

1. Komunikasi

Indikator di bidang komunikasi dirancang untuk mengevaluasi keberhasilan Diskominfo dalam menyediakan akses komunikasi yang merata dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Indikator yang digunakan meliputi:

- a. Cakupan layanan telekomunikasi
- b. Jumlah rumah tangga dengan akses internet:
- c. Jumlah jaringan internet publik:
- d. Partisipasi masyarakat melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM):
- e.

2. Informatika

Indikator di bidang informatika bertujuan untuk mengukur tingkat adopsi teknologi informasi di Kota Serang, khususnya terkait pemanfaatan infrastruktur digital dan layanan berbasis TI oleh perangkat daerah maupun masyarakat. Pengukuran ini dilakukan untuk melihat sejauh mana teknologi telah digunakan secara efektif dalam mendukung pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang lebih modern. Indikator utama meliputi:

- a. Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer/laptop:
- b. Pemanfaatan aplikasi berbasis teknologi di perangkat daerah:

- c. Penggunaan data terintegrasi untuk pengambilan kebijakan:
- d. Indeks literasi digital masyarakat Kota Serang: Indikator ini digunakan untuk menilai pemahaman masyarakat dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Literasi digital masyarakat menunjukkan tren positif dengan keberhasilan program edukasi yang dilakukan Diskominfo.

3. Persandian

Indikator di bidang persandian difokuskan pada keamanan informasi dan tata kelola data, terutama dalam memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data yang dikelola oleh pemerintah daerah. Pengukuran ini penting untuk menilai sejauh mana sistem persandian telah berfungsi secara optimal dalam mendukung perlindungan informasi serta mendukung proses layanan pemerintahan yang aman dan terpercaya. Indikator yang digunakan meliputi:

- a. Persentase perangkat daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi:
- b. Jumlah pelatihan keamanan data untuk aparatur pemerintahan:
- c. Penerapan teknologi enkripsi pada data pemerintahan:.

Analisis Indikator

1. Kekuatan (*Strengths*):
 - a. Keberhasilan dalam meningkatkan keamanan informasi dan mendorong partisipasi masyarakat melalui KIM.
 - b. Tren positif dalam literasi digital dan adopsi perangkat digital menunjukkan keberhasilan program edukasi Diskominfo.
2. Kelemahan (*Weaknesses*):
 - a. Penurunan akses internet di rumah tangga memerlukan intervensi strategis untuk memastikan pemerataan infrastruktur.
 - b. Implementasi data terintegrasi masih menghadapi tantangan koordinasi lintas perangkat daerah.
3. Peluang (*Opportunities*):
 - a. Dukungan dari program "Satu Data Indonesia" memberikan kerangka kerja untuk integrasi data yang lebih baik.
 - b. Teknologi baru seperti 5G dapat dimanfaatkan untuk memperluas akses komunikasi dan meningkatkan efisiensi operasional.
4. Ancaman (*Threats*):
 - a. Ancaman siber yang semakin kompleks memerlukan peningkatan kapasitas keamanan data yang berkelanjutan.

- b. Ketimpangan digital antar kecamatan dapat memperlambat pencapaian visi Kota Smart 2025.

Indikator-indikator ini memberikan panduan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan program Diskominfo Kota Serang pada tahun 2025. Melalui indikator yang terstruktur dan terukur, proses evaluasi dapat dilakukan secara lebih objektif sehingga hasilnya benar-benar mencerminkan capaian kinerja yang berlangsung di lapangan. Selain itu, penyusunan indikator ini turut memperkuat pengambilan kebijakan yang berbasis data, sejalan dengan agenda pembangunan nasional serta visi Kota Serang dalam meningkatkan kualitas layanan publik berbasis teknologi informasi.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam laporan Indikator Kinerja Pembangunan (IKP) Diskominfo Kota Serang Tahun 2025 menggunakan kombinasi pendekatan kuantitatif deskriptif dan kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai capaian kinerja di bidang komunikasi, informatika, dan persandian. Melalui data kuantitatif, laporan dapat menunjukkan perkembangan indikator secara terukur, sedangkan pendekatan kualitatif membantu menjelaskan konteks, tantangan, serta faktor-faktor yang memengaruhi hasil capaian tersebut. Dengan demikian, analisis yang dihasilkan menjadi lebih komprehensif dan dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan perbaikan di tahun berikutnya. Pendekatan kuantitatif memiliki keunggulan validasi sains alami, yang mencakup:

- Prosedur standar yang eksplisit.
- Pengukuran numerik yang presisi.
- Kemungkinan replikasi hasil penelitian (Neuman, 2006).

Melalui pendekatan ini, data dikumpulkan, diolah, dan dianalisis menggunakan metode statistik untuk menghasilkan deskripsi yang objektif dan netral. Proses pengolahan data dilakukan secara sistematis agar informasi yang diperoleh dapat mencerminkan kondisi kinerja secara akurat, sekaligus menghindari bias dalam interpretasi. Dengan demikian, hasil analisis dapat dijadikan dasar yang dapat dipertanggungjawabkan dalam menilai capaian pembangunan dan merumuskan rekomendasi

kebijakan. Studi kuantitatif menekankan pada prinsip-prinsip berikut:

1. Netralitas dan Objektivitas: Proses penelitian dilakukan tanpa intervensi subjektif dari peneliti.
2. Standarisasi Prosedur: Semua tahapan penelitian mengikuti protokol yang telah ditetapkan untuk memastikan hasil dapat direplikasi.
3. Pengukuran Numerik: Data dikonversi ke bentuk numerik untuk memudahkan analisis statistik.

Sedangkan pendekatan kualitatif digunakan sebagai pelengkap dalam memberikan konteks yang lebih dalam terhadap hasil yang diperoleh secara kuantitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami fenomena sosial, pandangan masyarakat, serta dinamika yang memengaruhi pencapaian indikator kinerja. Creswell (1998) menyatakan bahwa pendekatan kualitatif menghasilkan deskripsi kompleks melalui laporan terperinci berdasarkan pandangan responden dan situasi yang alami. Dalam pendekatan ini:

1. Kecukupan Data: Data yang dihimpun akan terus dikumpulkan hingga mencapai tingkat kejenuhan (saturation), di mana tidak ada informasi baru yang signifikan ditemukan (Neuman, 2003).
2. Kompleksitas Gambaran: Pendekatan ini menekankan pada penjelasan mendalam terhadap fenomena yang kompleks, seperti dinamika partisipasi masyarakat dalam Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).
3. Konteks Sosial: Memberikan perspektif yang lebih holistik mengenai tantangan yang dihadapi Diskominfo, seperti kesenjangan digital antarwilayah.

Kombinasi kedua pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk mengintegrasikan keunggulan masing-masing. Pendekatan kuantitatif memberikan gambaran angka yang objektif dan dapat diukur, sedangkan pendekatan kualitatif melengkapi dengan narasi kontekstual yang menjelaskan makna dari angka tersebut.

Dalam konteks tahun 2025, penelitian ini menekankan pentingnya integrasi data untuk mendukung pengambilan kebijakan berbasis bukti, yang sejalan dengan agenda nasional "Satu Data Indonesia". Selain itu, pendekatan ini relevan untuk mengevaluasi dampak kebijakan di bidang komunikasi, informatika, dan persandian terhadap pencapaian visi Kota Serang.

3.2. Metode Pengumpulan Data

1. Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada tiga kategori utama responden:

- a. Rumah tangga.
- b. Aparat kecamatan.
- c. Perangkat Daerah (PD).

Kuesioner tersebut dirancang untuk mengukur berbagai indikator kinerja utama, seperti tingkat akses terhadap teknologi informasi, keterlibatan masyarakat dalam Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), serta pemahaman dan penerapan keamanan data. Metode ini memungkinkan diperolehnya gambaran langsung mengenai kondisi aktual di lapangan, sehingga

informasi yang dihimpun lebih mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat dan perangkat pemerintah.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari:

- a. BPS Kota Serang: Data demografi, distribusi rumah tangga, dan statistik wilayah.
- b. Dokumen internal Diskominfo: Laporan tahunan dan perencanaan strategis.
- c. RPJMD Kota Serang Tahun 2025-2029. Target pembangunan yang relevan.

3.3. Populasi Dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian Indikator Kinerja Pembangunan (IKP) Diskominfo Kota Serang mencakup seluruh rumah tangga, aparat kecamatan, serta Perangkat Daerah (PD) yang berperan dalam penyelenggaraan layanan komunikasi, informatika, dan persandian di wilayah Kota Serang. Dari populasi tersebut, sampel dipilih secara proporsional untuk memastikan keterwakilan setiap kelompok responden. Pemilihan sampel dilakukan berdasarkan pertimbangan distribusi wilayah, jumlah rumah tangga, serta relevansi perangkat daerah terhadap indikator yang dikaji. Pendekatan ini memungkinkan data yang diperoleh menggambarkan kondisi faktual di lapangan dan dapat digunakan sebagai dasar analisis yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

3.3.1. Populasi dan Sampel Rumah Tangga

Populasi:

Jumlah rumah tangga di Kota Serang berdasarkan data BPS Tahun 2024 adalah 177.028 rumah tangga.

Sampel:

Menggunakan metode stratified random sampling, dengan strata berdasarkan kecamatan. Ukuran sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

- N : Populasi (177.028 rumah tangga).
- e : Tingkat kesalahan (5% atau 0,05).

Perhitungan:

$$n = \frac{177.028}{1 + 177.028(0,05)^2} = 399$$

Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 400 rumah tangga yang dianggap mewakili populasi di Kota Serang. Sampel tersebut didistribusikan secara proporsional ke setiap kecamatan sesuai dengan jumlah rumah tangga masing-masing wilayah, sehingga keterwakilan data tetap terjaga dan hasil penelitian dapat mencerminkan kondisi secara akurat.

Tabel1. Proporsi Sampling

Kecamatan	Populasi Rumah Tangga	Proporsi (%)	Sampel
Cipocok Jaya	14.553	8,2%	33
Curug	25.034	14,1%	56
Kasemen	24.981	14,1%	56
Serang	60.957	34,4%	138
Taktakan	25.07	14,2%	57
Walantaka	26.433	14,9%	60
Total	177.028	100%	400

Pembagian sampel penelitian ditetapkan secara proporsional berdasarkan jumlah rumah tangga di tiap kecamatan di Kota Serang. Dengan total populasi 177.028 rumah tangga, alokasi sampel disesuaikan dengan proporsi masing-masing wilayah agar keterwakilan data tetap terjaga. Kecamatan Serang, sebagai wilayah dengan populasi terbesar yaitu 60.957 rumah tangga (34,4%), memperoleh sampel terbanyak sebanyak 138 responden. Sementara kecamatan lainnya, seperti Cipocok Jaya, Curug, Kasemen, Taktakan, dan Walantaka, mendapatkan alokasi sampel antara 33 hingga 60 responden, sesuai besaran populasinya.

Total 400 sampel yang digunakan memastikan bahwa hasil penelitian dapat menggambarkan kondisi nyata di seluruh kecamatan secara seimbang dan proporsional.

3.3.2. Populasi Kecamatan

Populasi kecamatan mencakup **6 kecamatan** di Kota Serang:

1. Cipocok Jaya.
2. Curug.
3. Kasemen.
4. Serang.
5. Taktakan.
6. Walantaka.

Semua kecamatan di Kota Serang dimasukkan sebagai responden untuk memastikan keterwakilan penuh dalam penelitian. Pendekatan ini memungkinkan setiap wilayah memberikan kontribusi data yang mencerminkan kondisi nyata di tingkat kecamatan, sehingga hasil analisis menjadi lebih akurat dan mencakup seluruh variasi kebutuhan serta capaian di lapangan.

3.3.3. Populasi Perangkat Daerah (PD)

Jumlah perangkat daerah di Kota Serang sebanyak 40 perangkat daerah. Seluruh Perangkat Daerah yang memiliki keterkaitan dengan bidang komunikasi, informatika, dan persandian turut dimasukkan sebagai bagian dari penelitian. Keterlibatan PD tersebut memastikan bahwa data yang diperoleh mencerminkan kondisi aktual penyelenggaraan layanan pemerintahan serta mendukung analisis kinerja Diskominfo secara lebih komprehensif.

3.4. Teknik Analisis Data Penelitian

Teknik analisis data proses sistematis yang digunakan untuk mengolah, menginterpretasikan, dan menyimpulkan data yang diperoleh selama penelitian. Proses ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah dan membuktikan tujuan penelitian secara ilmiah. Analisis data melibatkan serangkaian tahapan seperti pengumpulan, pemilahan, pengkodean, pemaknaan, hingga penyajian data dalam bentuk yang jelas dan terstruktur.

3.4.1. Uji Coba Instrumen

Sebelum pelaksanaan survei, instrumen kuesioner diuji coba terlebih dahulu kepada 20 responden untuk memastikan bahwa setiap pertanyaan yang disusun mampu mengukur variabel yang dimaksud secara tepat. Proses uji coba ini dilakukan untuk menilai validitas butir pertanyaan serta reliabilitas keseluruhan instrumen, sehingga potensi kesalahan pengukuran dapat diminimalkan. Melalui tahap ini, kuesioner dapat disempurnakan sebelum digunakan dalam pengumpulan data utama, sehingga hasil yang diperoleh lebih akurat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis.. Uji reliabilitas dilakukan menggunakan Cronbach's Alpha dengan hasil:

$$\text{Alpha} = 0,85$$

Hasil ini menunjukkan instrumen memiliki reliabilitas tinggi (nilai $> 0,7$).

3.4.2. Pelatihan Petugas Lapangan (Enumerator)

Petugas lapangan diberikan pelatihan selama dua hari untuk memastikan mereka memahami instrumen survei serta prosedur pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian. Pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan teknis dan memastikan konsistensi dalam pelaksanaan survei di seluruh lokasi penelitian. Pelatihan mencakup:

- Teknik wawancara, agar petugas mampu menggali informasi dengan tepat dan menjaga ketepatan jawaban responden.
- Penggunaan kuesioner, termasuk cara membaca instrumen, mencatat jawaban, dan menangani berbagai kondisi saat pengisian berlangsung.
- Etika penelitian di lapangan, untuk memastikan proses pengumpulan data dilakukan secara profesional, menghormati privasi responden, dan mematuhi prinsip-prinsip penelitian yang benar.

Pelatihan ini menjadi langkah penting untuk menjamin kualitas data yang diperoleh selama proses survei berlangsung. Melalui pelatihan tersebut, petugas lapangan tidak hanya memahami prosedur teknis, tetapi juga dibekali kemampuan untuk menghadapi berbagai situasi di lapangan, seperti perbedaan karakter responden maupun kendala administratif. Dengan kesiapan yang lebih matang, proses pengumpulan data dapat berjalan lebih terstandar, akurat, dan sesuai dengan kaidah metodologis yang telah ditetapkan.

3.4.3. Pelaksanaan Survei

Survei dilaksanakan pada bulan November 2025 dengan melibatkan enumerator yang telah dibekali pelatihan terkait penggunaan instrumen dan etika pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan secara langsung (face to face interview), di mana enumerator mendatangi rumah tangga serta perangkat daerah untuk mengisi kuesioner sesuai prosedur yang ditetapkan.

Pada prosesnya, enumerator menanyakan setiap pertanyaan secara terstruktur, memastikan kejelasan jawaban, serta memberikan penjelasan seperlunya tanpa mengarahkan responden. Pelaksanaan survei berada di bawah supervisi tim Diskominfo yang bertugas memantau kualitas data dan melakukan pengecekan terhadap kuesioner yang telah dikumpulkan. Dengan mekanisme ini, data yang diperoleh diharapkan akurat dan dapat digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan terkait pengembangan

3.4.4. Pelaksanaan Survei

Pelaksanaan survei mengikuti jadwal berikut:

Tahap	Waktu	Kegiatan
Perencanaan	September 2024	Penyusunan instrumen dan pelatihan.
Pengumpulan Data	November 2024	Survei lapangan dan pengumpulan dokumen.
Pengolahan Data	November 2025	Analisis statistik dan perbandingan.
Penyusunan Laporan	November 2025	Penulisan laporan akhir.

Teknik analisis data dilakukan secara kuantitatif dengan memanfaatkan perangkat lunak statistik. Proses analisis mencakup pengolahan, penghitungan, serta penyajian data dalam bentuk deskripsi numerik yang menggambarkan capaian setiap indikator kinerja. Melalui analisis ini, hasil survei dapat diukur secara objektif, sehingga informasi yang dihasilkan lebih akurat, terukur, dan berbasis data. Temuan tersebut kemudian digunakan sebagai dasar evaluasi dan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kinerja dan layanan pemerintah.

BAB IV PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian tentang Indikator Kinerja Pembangunan (IKP) ini dilakukan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang Provinsi Banten Tahun 2025. Peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang selaras dengan misi dari Kota Serang yang salah satu tujuannya terpenuhinya infrastruktur daerah yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah dan strategi peningkatan infrastruktur dan layanan teknologi informasi komunikasi penunjang implementasi *Smart City* Kota Serang. Selain itu Diskominfo juga memiliki tujuan yang selaras dengan misi Kota Serang meningkatkan tata pemerintahan yang baik dengan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang prima berbasis teknologi informasi melalui strategi peningkatan pelayanan *egovernment*, informasi publik dan penyediaan data statistik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pemerintah Kota Serang terdiri dari 6 kecamatan serta 67 kelurahan, setelah sebelumnya pada tahun 2013 sebanyak 30 desa mengalami perubahan status dari desa menjadi kelurahan. Hingga saat ini, pemerintahan Kota Serang tidak mengalami perubahan jumlah kecamatan, sedangkan jumlah kelurahan pada

Tahun 2017 mengalami penambahan satu kelurahan di Kecamatan Taktakan yaitu pemekaran Kelurahan Cilowong menjadi Kelurahan Cilowong dan Cibendung. Pemerintahan Kota Serang dipimpin oleh seorang Walikota. Berdasarkan susunan Pemerintahan Kota Serang periode 2018-2023, dalam menjalankan pemerintahan walikota dibantu oleh sekretariat daerah, lembaga teknis daerah, dan dinas daerah.

Tugas Pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang sesuai Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang adalah melaksanakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan visi, misi dan program Walikota sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Adapun Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang adalah untuk melaksanakan Tugas Pokok yang terdiri atas :

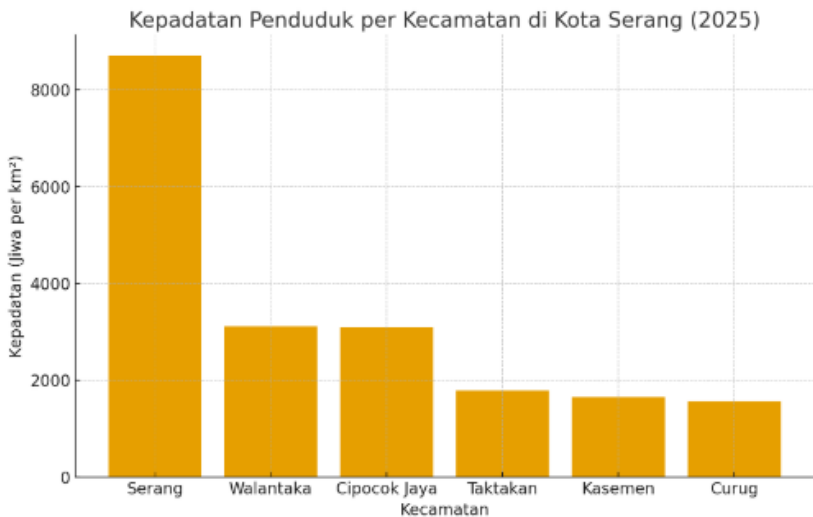
1. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan dibidang komunikasi dan informatika;
2. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan dibidang persandian;

3. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan dibidang statistik;
4. Perumusan kebijakan teknis tentang pengembangan dan layanan *e-Government*;
5. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dibidang komunikasi dan informatika;
6. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang persandian;
7. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang statistik;
8. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi dan informatika;
9. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang persandian;
10. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang statistik;
11. Pelaksanaan fungsi selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
12. Pelaksanaan ketatausahaan Dinas;
13. Pengelolaan UPT; dan
14. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Kota Serang memiliki luas wilayah sebesar 266,74 km², yang terdiri dari 6 kecamatan dan 67 kelurahan. Kota ini memiliki karakteristik wilayah yang cukup beragam, dengan kawasan urban yang menjadi pusat pemerintahan dan layanan publik, serta kawasan pinggiran yang memerlukan perhatian lebih dalam pemerataan infrastruktur teknologi.



Selatan, yaitu sepanjang 21,7 km. Dengan relief wilayah atau topografi yang cukup datar. Areal Kota Serang didominasi oleh dataran rendah yang memiliki ketinggian kurang dari 25 mdpl. Posisi geografis wilayah Kota Serang dikelilingi oleh daratan yang merupakan wilayah Kabupaten Serang. Namun, sebelah Utara Kota Serang berbatasan dengan laut yaitu kawasan Laut Jawa (Sumber : Kota Serang Dalam Angka 2025, BPS Kota Serang 2025).



Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, jumlah penduduk Kota Serang adalah 734.866 jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 2.713 jiwa/km². Kecamatan Serang memiliki kepadatan tertinggi, sedangkan kecamatan Kasemen dan Walantaka memiliki kepadatan yang lebih rendah.

Hal ini menciptakan tantangan dalam pemerataan akses teknologi dan informasi, khususnya di daerah pinggiran.

Penduduk Kota Serang terdiri dari beragam latar belakang sosial dan ekonomi, dengan sebagian besar bekerja di sektor jasa, perdagangan, dan pertanian. Masyarakat perkotaan lebih mudah mengakses layanan komunikasi dan teknologi informasi dibandingkan masyarakat di wilayah pinggiran.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Diskominfo Kota Serang dalam bidang komunikasi, informatika, dan persandian, yang selaras dengan misi Kota Serang dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Fokus penelitian mencakup:

1. Penyediaan infrastruktur telekomunikasi yang merata di seluruh wilayah.
2. Peningkatan literasi digital masyarakat melalui pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).
3. Implementasi program e-government yang mendukung layanan publik berbasis teknologi.
4. Peningkatan keamanan informasi melalui persandian dan pengelolaan data pemerintahan yang terintegrasi.

Deskripsi objek penelitian ini memberikan gambaran mengenai latar belakang dan kondisi geografis Kota Serang,

sekaligus menjelaskan karakteristik wilayah yang menjadi dasar kebutuhan pengembangan layanan berbasis teknologi informasi. Penjabaran ini mendukung fokus penelitian dalam melihat kesiapan daerah menuju tata kelola yang terintegrasi secara digital, sesuai dengan arah pembangunan daerah. Melalui pemahaman tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian visi Kota Serang sebagai “Kota Smart 2025.”

4.2. Deskripsi Data Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur Indikator Kinerja Pembangunan (IKP) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Serang Tahun 2025 melalui data yang diperoleh dari lapangan. Data utama yang digunakan berupa data primer, yang dikumpulkan langsung dari dinas, instansi, dan objek penelitian yang berkaitan. Data ini diolah untuk menghasilkan analisis yang relevan guna menjawab rumusan masalah penelitian. Selain itu, data sekunder, seperti dokumen-dokumen terkait, digunakan sebagai data pendukung untuk memperkaya analisis penelitian.

Dalam penelitian ini, data atau informasi yang telah diperoleh dari lapangan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan dalam bab sebelumnya berupa data primer yang diperoleh dari dinas, instansi maupun objek yang berkaitan langsung yang kemudian diolah sehingga menghasilkan analisis yang diperlukan dalam keperluan penelitian ini. Sedangkan data-data lainnya yang berupa dokumen-dokumen dijadikan

sebagai data pendukung dalam menjawab rumusan masalah penelitian. Data-data pendukung tersebut didapatkan dengan media wawancara, catatan lapangan serta hasil rekaman dari wawancara dengan objek yang berkaitan dengan penelitian Indikator Kinerja Pembangunan (IKP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang Provinsi Banten Tahun 2025.

Pengumpulan data dilakukan dengan berbagai metode, termasuk wawancara, pencatatan lapangan, dan dokumentasi hasil survei. Data tersebut kemudian dianalisis melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Reduksi Data (Data Reduction): Data yang terkumpul disaring untuk memastikan hanya data yang relevan dengan penelitian yang digunakan.
2. Penyajian Data (Data Display): Data yang telah dipilih disusun dalam bentuk tabel, grafik, atau narasi untuk memudahkan analisis lebih lanjut.
3. Verifikasi dan Interpretasi (Verification): Data yang disajikan diverifikasi kembali untuk memastikan validitas, kemudian diinterpretasikan untuk menghasilkan kesimpulan yang bermakna.

Proses ini memungkinkan data yang diperoleh tidak hanya digunakan sebagai jawaban atas rumusan masalah, tetapi juga memberikan wawasan baru dalam memahami indikator kinerja pembangunan di Diskominfo Kota Serang.

Data Primer:

1. Sumber: Kuesioner yang disebarakan kepada rumah tangga, kecamatan, dan perangkat daerah (PD) di Kota Serang.
2. Jenis Informasi:
 - a. Tingkat akses teknologi informasi di masyarakat.
 - b. Penggunaan aplikasi berbasis teknologi di perangkat daerah.
 - c. Partisipasi masyarakat dalam Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).
 - d. Tingkat keamanan informasi di lingkungan pemerintahan.

Data Sekunder:

1. Sumber: Dokumen resmi dari Diskominfo, RPJMD Kota Serang 2018-2023, laporan BPS Kota Serang, serta data terkait dari program "Satu Data Indonesia."
2. Jenis Informasi:
 - a. Distribusi demografis dan wilayah.
 - b. Data historis mengenai indikator kinerja pembangunan.
 - c. Kebijakan strategis yang mendukung pelaksanaan program di Diskominfo.

Sebagaimana dijelaskan pada Bab 3, penelitian ini menggunakan tiga jenis sampel, yaitu rumah tangga, kecamatan, dan perangkat daerah (PD). Berikut adalah rencana sampel:

1. Rumah Tangga:

Jumlah Sampel: 400 rumah tangga, terdistribusi secara proporsional di 6 kecamatan.
2. Kecamatan:

Jumlah Sampel: Seluruh 6 kecamatan di Kota Serang menjadi objek penelitian.
3. Perangkat Daerah (PD):

Jumlah Sampel: 40 perangkat daerah di Kota Serang.

Data hasil penelitian disajikan dalam bentuk tabel dan grafik untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai indikator kinerja pembangunan.

Data yang telah dikumpulkan ini menjadi dasar untuk analisis lebih mendalam pada subbab berikutnya. Penekanan pada reduksi, penyajian, dan verifikasi data memastikan bahwa penelitian ini menghasilkan wawasan yang relevan dan dapat diandalkan untuk evaluasi kinerja Diskominfo Kota Serang.

4.2.1. Sampel Rumah Tangga

Jumlah sampel dalam penelitian ini berasal dari populasi rumah tangga di Kota Serang yang berjumlah 177.028 rumah tangga (Sumber: Kota Serang Dalam Angka, BPS Kota Serang 2023). Berdasarkan penjelasan di Bab 3, penelitian ini menggunakan margin of error (e) = 5% dan teknik proportional random sampling, menghasilkan jumlah sampel sebanyak 400 rumah tangga.

Pembagian sampel dilakukan secara proporsional berdasarkan jumlah populasi rumah tangga di masing-masing kecamatan untuk memastikan keterwakilan yang adil. Berikut adalah pembagian jumlah sampel di setiap kecamatan:

Tabel 4.2. Jumlah Sampel Penelitian Satuan Rumah Tangga per Kecamatan

Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga	Proporsi (%)	Jumlah Sampel
Cipocok Jaya	14.553	8,2%	33
Curug	25.034	14,1%	56

Kasemen	24.981	14,1%	56
Serang	60.957	34,4%	138
Taktakan	25.07	14,2%	57
Walantaka	26.433	14,9%	60
Total	177.028	100%	400

Sebanyak 400 sampel dalam penelitian ini tersebar di 67 kelurahan di Kota Serang. Penentuan jumlah responden dilakukan secara proporsional berdasarkan jumlah RW di masing-masing kelurahan, sehingga distribusi sampel mencerminkan kondisi populasi secara lebih akurat. Rincian pembagian sampel per kelurahan dapat dilihat pada Bab 3.

4.2.2. Sampel Kecamatan

Jumlah sampel dalam kategori ini mencakup seluruh 6 kecamatan yang ada di Kota Serang. Pemilihan seluruh kecamatan sebagai unit analisis dilakukan agar hasil penelitian dapat mewakili kondisi pemerataan akses teknologi informasi secara menyeluruh di tingkat wilayah. Dengan cakupan total ini, evaluasi yang dilakukan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perbedaan kebutuhan, tantangan, serta potensi pengembangan layanan berbasis digital di setiap kecamatan, yaitu:

1. Cipocok Jaya.
2. Curug.
3. Kasemen.

4. Serang.
5. Taktakan.
6. Walantaka.

Setiap kecamatan menjadi unit pengumpulan data yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat pemerataan akses teknologi informasi di Kota Serang. Melalui unit wilayah ini, penelitian menilai cakupan layanan telekomunikasi, tingkat partisipasi masyarakat dalam Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), serta berbagai indikator pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan pemerintahan dan masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih spesifik terhadap kondisi digital di masing-masing wilayah, sehingga hasil penelitian dapat menggambarkan kebutuhan dan tantangan yang berbeda antar kecamatan. Kecamatan menjadi unit pengumpulan data untuk mengevaluasi cakupan layanan telekomunikasi, partisipasi masyarakat dalam Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), dan indikator akses teknologi informasi di wilayah tersebut.

4.2.3. Sampel Perangkat Daerah (PD)

Dalam penelitian ini, terdapat 6 (enam) perangkat daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kota Serang yang menjadi objek pengumpulan data. Perangkat daerah tersebut dipilih karena memiliki peran strategis dalam penyediaan layanan publik serta pengelolaan informasi pemerintahan. Penilaian terhadap unit ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kesiapan, penerapan, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung layanan berbasis digital, sehingga dapat menggambarkan kontribusi perangkat daerah terhadap pembangunan Kota Serang menuju layanan pemerintahan yang semakin terintegrasi. Sampel ini mencakup perangkat daerah yang terkait dengan pengelolaan komunikasi, informatika, dan persandian, seperti:

1. Inspektorat Kota Serang
2. Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang
3. BKPSDM Kota Serang
4. Bagian Kesra Setda Kota Serang
5. Bagian Hukum Setda Kota Serang

Penelitian terhadap perangkat daerah difokuskan pada:

1. Tingkat adopsi teknologi berbasis aplikasi untuk operasional.
2. Pemanfaatan sandi dalam komunikasi resmi.

3. Penggunaan data terintegrasi dalam pengambilan keputusan.

4.2.4. Pengolahan dan Penyajian Data

Data yang dikumpulkan dari ketiga kategori sampel tersebut kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data sebagaimana dijelaskan pada Bab 3. Tahap reduksi dilakukan untuk memilah informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk tabel, grafik, maupun narasi untuk memudahkan interpretasi. Tahap terakhir adalah verifikasi atau penarikan kesimpulan, yang bertujuan memastikan bahwa hasil analisis akurat dan sesuai dengan tujuan penelitian..

4.2.5. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang

Berikut disajikan tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang Tahun 2021 yang menjadi acuan dalam pelaksanaan, pengendalian, serta evaluasi kinerja perangkat daerah. Indikator Kinerja Utama tersebut ditetapkan secara resmi melalui Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang Nomor: 027/SK.76-DISKOMINFO/2021 tanggal 1 Februari 2021. Penetapan IKU ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang selaras dengan tujuan strategis organisasi serta mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Serang.:

IKU yang tercantum dalam tabel tersebut berfungsi sebagai tolok ukur utama dalam menilai tingkat keberhasilan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, baik dari aspek perencanaan maupun hasil pelaksanaan kegiatan. Melalui indikator-indikator ini, kinerja organisasi dapat diukur secara objektif, terukur, dan berkelanjutan, sehingga

memudahkan proses pemantauan dan evaluasi terhadap capaian kinerja setiap tahunnya.

Tabel 4.5. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang

Menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang yang digunakan sebagai acuan dalam mengukur tingkat pencapaian kinerja organisasi. IKU tersebut disusun untuk menggambarkan keterkaitan antara tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat diarahkan secara terukur dan selaras dengan arah kebijakan yang ditentukan.

Dalam tabel ini ditampilkan beberapa komponen utama, yaitu tujuan, sasaran, indikator kinerja, penjelasan atau formulasi indikator yang mencakup rumus perhitungan, serta target yang ingin dicapai. Penyajian komponen-komponen tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dasar penilaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang. Dengan adanya IKU yang jelas dan terukur, proses pemantauan,

evaluasi, serta pengambilan keputusan terkait peningkatan kinerja dapat dilakukan secara lebih sistematis dan akuntabel.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan/ Formulasi (Rumus Perhitungan)	Target
1	Terwujudnya implementasi smart city Kota Serang	Tingkat Kematangan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Mengukur sejauh mana penerapan SPBE di Kota Serang	Skor penilaian tingkat kematangan SPBE	2,5%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan/ Formulasi (Rumus Perhitungan)	Target
2	Meningkatnya kualitas layanan informasi publik	Persentase permohonan informasi yang ditanggapi tepat waktu	Mengukur responsivitas terhadap permohonan informasi publik	$(\text{Jumlah permohonan yang ditanggapi tepat waktu} / \text{Total permohonan}) \times 100\%$	90%
3	Meningkatnya literasi digital masyarakat	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam program literasi digital	Mengukur partisipasi masyarakat dalam program literasi digital	$(\text{Jumlah peserta program literasi tahun ini} - \text{Tahun sebelumnya}) / \text{Tahun sebelumnya} \times 100\%$	10%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan/ Formulasi (Rumus Perhitungan)	Target
4	Meningkatnya keamanan informasi pemerintah daerah	Persentase perangkat daerah yang menerapkan standar keamanan informasi	Mengukur tingkat penerapan standar keamanan informasi di perangkat daerah	$(\text{Jumlah perangkat daerah yang menerapkan standar} / \text{Total perangkat daerah}) \times 100\%$	80%
5	Meningkatnya aksesibilitas layanan komunikasi dan informatika	Persentase wilayah yang terlayani akses internet	Mengukur cakupan wilayah yang memiliki akses internet	$(\text{Jumlah wilayah terlayani internet} / \text{Total wilayah}) \times 100\%$	85%

Indikator-indikator di atas disusun untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Keberadaan indikator kinerja tersebut menjadi instrumen penting dalam menilai sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan mampu mendukung peningkatan kualitas layanan publik, transparansi informasi, serta efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.

Penyusunan indikator kinerja ini mengacu pada amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Dengan berpedoman pada regulasi tersebut, setiap indikator yang ditetapkan memiliki dasar hukum yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini memastikan bahwa proses penilaian kinerja tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan capaian nyata dari pelaksanaan kebijakan dan program yang dijalankan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang.

Selain berfungsi sebagai alat ukur capaian kinerja, indikator-indikator tersebut juga berperan sebagai sarana evaluasi dan pengendalian dalam pelaksanaan pembangunan bidang

komunikasi dan informatika. Melalui indikator ini, organisasi dapat mengidentifikasi tingkat keberhasilan, hambatan yang dihadapi, serta area yang masih memerlukan perbaikan. Dengan demikian, indikator kinerja tidak hanya digunakan untuk menilai hasil akhir, tetapi juga menjadi dasar dalam perumusan strategi dan kebijakan lanjutan agar program dan kegiatan Diskominfo dapat berjalan selaras dengan arah pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

4.2.6. Indikator Kinerja Diskominfo Tahun 2025

Pada tahun 2025, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang menyusun sejumlah indikator kinerja yang dirancang untuk mencerminkan capaian penyelenggaraan layanan komunikasi publik, penguatan infrastruktur digital, keamanan informasi, serta pengelolaan data dan statistik sektoral. Indikator-indikator tersebut disusun secara sistematis sebagai bagian dari upaya pengukuran kinerja perangkat daerah, sekaligus sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Keseluruhan indikator kinerja tersebut dihimpun dalam dokumen resmi yang menjadi rujukan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang. Dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur capaian kinerja, tetapi juga sebagai sumber data yang memberikan gambaran faktual mengenai tingkat keberhasilan program, kondisi infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang telah tersedia, serta berbagai tantangan dan kendala yang masih

dihadapi dalam penyelenggaraan layanan informasi dan komunikasi kepada masyarakat.

Selain itu, data yang tersaji juga mencerminkan sejauh mana efektivitas kebijakan dan strategi yang telah diterapkan dalam mendukung transformasi digital di lingkungan Pemerintah Kota Serang. Informasi yang disajikan dalam bentuk tabel memungkinkan pembaca untuk memahami capaian kinerja secara lebih terstruktur dan objektif, serta memudahkan proses perbandingan antar indikator maupun antar periode waktu.

Penyajian tabel-tabel pada bagian ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait kondisi eksisting sebelum dilakukan analisis lebih lanjut pada subbab berikutnya. Dengan demikian, hasil analisis yang disusun diharapkan dapat didasarkan pada data yang akurat dan terukur, serta mampu menggambarkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang secara menyeluruh.

Tabel 4.6. Indikator Jaringan Komunikasi Tahun 2025

Menyajikan indikator jaringan komunikasi yang digunakan untuk menggambarkan kondisi infrastruktur jaringan telekomunikasi di Kota Serang pada tahun 2025. Indikator-indikator tersebut mencakup jumlah jaringan telepon genggam, jumlah jaringan telepon stasioner, serta total jaringan yang tersedia secara keseluruhan. Penyajian indikator ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kapasitas dan ketersediaan jaringan komunikasi sebagai salah satu komponen penting dalam mendukung layanan informasi dan komunikasi kepada masyarakat.

Data pada tabel disusun dengan menampilkan perbandingan capaian tahun 2024 dengan kondisi tahun 2025 yang dibagi ke dalam Semester I dan Semester II. Pembagian periode waktu ini dimaksudkan untuk menunjukkan apakah terdapat perubahan, peningkatan, maupun penurunan jumlah jaringan komunikasi dalam kurun waktu tertentu, sekaligus untuk melihat tingkat konsistensi pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur jaringan yang ada. Dengan demikian, tabel ini dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai stabilitas serta keberlanjutan infrastruktur jaringan komunikasi yang dikelola.

Melalui penyajian data secara terstruktur dalam bentuk tabel, pembaca diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang lebih jelas dan objektif mengenai kondisi eksisting jaringan komunikasi di Kota Serang. Informasi ini selanjutnya menjadi bahan pendukung dalam proses analisis kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, khususnya dalam aspek penguatan infrastruktur telekomunikasi, sebelum dilakukan pembahasan lebih lanjut pada subbab berikutnya.

No	Uraian	2024	2025	
			Semester I	Semester II
1	Jumlah Jaringan Telepon genggam	165	165	165
2	Jumlah Jaringan telepon stasioner	224	224	224
3	Total Jaringan	389	389	389

Tabel tersebut menyajikan data mengenai jumlah jaringan telepon berdasarkan jenis layanan pada tahun 2024 serta pada Semester I dan Semester II tahun 2025. Data yang ditampilkan dikelompokkan ke dalam dua kategori utama, yaitu jaringan telepon genggam dan jaringan telepon stasioner, yang merupakan bagian dari infrastruktur telekomunikasi dasar dalam mendukung layanan komunikasi di Kota Serang.

Berdasarkan data pada tahun 2024, jumlah jaringan telepon genggam tercatat sebanyak 165 jaringan, sedangkan jaringan telepon stasioner berjumlah 224 jaringan. Komposisi ini menunjukkan bahwa jaringan telepon stasioner masih memiliki porsi yang cukup signifikan dibandingkan jaringan telepon genggam dalam struktur infrastruktur komunikasi yang ada. Jumlah tersebut kemudian dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2025 yang dibagi ke dalam Semester I dan Semester II untuk melihat adanya dinamika perubahan dalam kurun waktu tersebut.

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa pada tahun 2025, baik pada Semester I maupun Semester II, jumlah jaringan telepon genggam dan jaringan telepon stasioner tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jaringan telepon genggam tetap berada

pada angka 165 jaringan, sementara jaringan telepon stasioner juga tetap tercatat sebanyak 224 jaringan. Dengan demikian, total keseluruhan jaringan pada setiap periode pengamatan berada pada angka yang sama, yaitu 389 jaringan.

Stabilnya jumlah jaringan pada seluruh periode tersebut mengindikasikan bahwa selama rentang waktu 2024 hingga 2025 tidak terjadi penambahan maupun pengurangan infrastruktur jaringan telepon. Kondisi ini dapat diartikan bahwa kapasitas dan cakupan jaringan telekomunikasi di Kota Serang berada pada kondisi yang relatif tetap. Di satu sisi, hal ini mencerminkan keberlangsungan layanan jaringan yang terjaga dan tidak mengalami penurunan. Namun, di sisi lain, tidak adanya peningkatan jumlah jaringan juga dapat menjadi indikasi bahwa pengembangan atau perluasan infrastruktur telekomunikasi belum menjadi prioritas pada periode tersebut.

Secara keseluruhan, data ini memberikan gambaran bahwa fokus pengelolaan jaringan telekomunikasi pada tahun 2024 hingga 2025 lebih diarahkan pada aspek pemeliharaan dan stabilitas jaringan yang telah ada, dibandingkan dengan ekspansi jaringan baru. Informasi ini menjadi penting sebagai dasar pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan perencanaan pengembangan infrastruktur telekomunikasi di periode selanjutnya.



Diagram ini menggambarkan jumlah jaringan telepon di Kota Serang berdasarkan jenis layanan pada tahun 2024 serta pada Semester I dan Semester II tahun 2025. Setiap batang pada diagram merepresentasikan total jaringan yang tersedia pada masing-masing periode, yang tersusun atas dua jenis layanan, yaitu jaringan telepon genggam dan jaringan telepon stasioner. Penyajian dalam bentuk diagram bertumpuk ini memudahkan pembaca untuk melihat

komposisi setiap jenis jaringan sekaligus memahami kontribusinya terhadap total keseluruhan jaringan telekomunikasi yang ada.

Berdasarkan grafik tersebut, dapat diketahui bahwa komposisi dan jumlah jaringan telepon pada setiap periode pengamatan tidak mengalami perubahan. Jaringan telepon genggam tetap berjumlah 165 jaringan, sedangkan jaringan telepon stasioner tercatat sebanyak 224 jaringan, sehingga total jaringan pada seluruh periode berada pada angka 389 jaringan. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama rentang waktu 2024 hingga 2025, infrastruktur jaringan telekomunikasi di Kota Serang berada dalam keadaan yang relatif stabil tanpa adanya penambahan maupun pengurangan jaringan. Stabilitas tersebut mengindikasikan bahwa fokus pengelolaan jaringan pada periode ini lebih diarahkan pada pemeliharaan dan keberlanjutan layanan, bukan pada pengembangan atau ekspansi jaringan baru.

Tabel 4.7. Rasio Wartel/Warnet per 100.000 Penduduk Tahun 2023–2025

Fasilitas akses komunikasi publik berupa wartel dan warnet di enam kecamatan di Kota Serang disajikan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi ketersediaan sarana komunikasi konvensional yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Data yang ditampilkan mencakup periode tahun 2024 serta tahun 2025 yang dibagi ke dalam Semester I dan Semester II, sehingga memungkinkan adanya perbandingan kondisi antarperiode waktu. Indikator yang digunakan dalam penyajian data meliputi jumlah penduduk, jumlah wartel, jumlah warnet, serta rasio wartel dan warnet per 100.000 penduduk pada masing-masing kecamatan.

Rasio wartel dan warnet per 100.000 penduduk digunakan sebagai ukuran untuk menggambarkan tingkat ketersediaan layanan komunikasi publik secara lebih objektif, karena mempertimbangkan perbandingan antara jumlah fasilitas yang tersedia dengan jumlah penduduk di suatu wilayah. Melalui rasio ini, dapat diketahui sejauh mana fasilitas komunikasi publik konvensional masih mampu menjangkau kebutuhan masyarakat di setiap kecamatan. Penyajian data tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai distribusi fasilitas wartel dan warnet,

sekaligus menjadi dasar dalam menganalisis pemerataan akses komunikasi publik di Kota Serang pada periode pengamatan.

Data mengenai fasilitas wartel dan warnet tersebut juga mencerminkan dinamika perubahan pola akses komunikasi masyarakat di tingkat kecamatan. Stagnasi maupun keterbatasan jumlah fasilitas komunikasi publik konvensional menunjukkan adanya pergeseran menuju pemanfaatan teknologi komunikasi berbasis digital dan perangkat pribadi. Meskipun demikian, keberadaan wartel dan warnet masih memiliki fungsi tertentu, terutama bagi masyarakat yang belum memiliki akses internet pribadi atau membutuhkan fasilitas pendukung seperti komputer dan jaringan yang memadai. Oleh karena itu, data ini menjadi penting sebagai dasar pertimbangan dalam perumusan kebijakan pengembangan akses komunikasi publik yang lebih adaptif, inklusif, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan teknologi informasi.

Pemanfaatan data ini diharapkan dapat mendukung proses perencanaan dan pengambilan keputusan pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pengembangan layanan komunikasi publik. Dengan memahami kondisi eksisting dan perbedaan antarwilayah, kebijakan yang dirumuskan dapat lebih tepat sasaran serta mampu mendorong pemerataan akses informasi dan komunikasi bagi seluruh masyarakat Kota Serang.

No	Kecamatan	2024				
		Σ Penduduk	Σ Wartel	Σ Warnet	Rasio Wartel	Rasio Warnet
1	2	3	4	5	6	7
1	Cipocok Jaya	105,664	0	10	0	9.5
2	Curug	61,070	0	4	0	6.5
3	Kasemen	113,972	0	17	0	14.9
4	Serang	230,966	0	32	0	13.9
5	Taktakan	109,177	0	10	0	9.2
6	Walantaka	114,017	0	11	0	9.6
	Jumlah	734,866	0	84	0	11.4

2025									
semester I					semester II				
Σ Penduduk	Σ Wartel	Σ Warnet	Rasio Wartel	Rasio Warnet	Σ Penduduk	Σ Wartel	Σ Warnet	Rasio Wartel	Rasio Warnet
8	9	10	11	12	8	9	10	11	12
105,664	0	5	-	0.05	91,996	0	8	0	0.09
61,070	0	10	0	0.164	53,625	0	4	0	0.075
113,972	0	4	0	0.0035	97,430	0	15	0	0.0154
230,966	0	17	0	0.01	224,546	0	28	0	0.01
109,177	0	32	0	0.3	92,361	0	10	0	0.1
114,017	0	10	0	0.09	92,234	0	11	0	0.12
		11							
734,866	0	78	0	0.011	652,192	0	76	0	0.012

Berdasarkan data yang tersedia, terlihat bahwa sebagian besar kecamatan memiliki jumlah wartel yang sangat minim, bahkan pada beberapa wilayah tercatat tidak terdapat wartel sama sekali. Kondisi ini menunjukkan bahwa fasilitas komunikasi publik berbasis telepon konvensional telah mengalami penurunan fungsi yang signifikan. Keberadaan warnet masih ditemukan di beberapa kecamatan, seperti

Kecamatan Serang, Kasemen, dan Walantaka, namun jumlahnya relatif terbatas serta menunjukkan kecenderungan stagnan atau mengalami penurunan dari satu semester ke semester berikutnya. Fenomena tersebut mencerminkan adanya perubahan pola akses komunikasi dan informasi di masyarakat yang kini lebih mengandalkan perangkat pribadi, khususnya telepon genggam yang terhubung dengan jaringan internet, dibandingkan dengan penggunaan fasilitas umum konvensional.

Rasio wartel dan warnet per 100.000 penduduk memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai tingkat ketersediaan fasilitas komunikasi publik antarwilayah. Meskipun kecamatan dengan jumlah penduduk besar seperti Serang dan Kasemen memiliki jumlah warnet yang relatif lebih banyak dibandingkan kecamatan lainnya, rasio per 100.000 penduduk tetap menunjukkan angka yang rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan fasilitas tersebut belum sebanding dengan kebutuhan populasi yang ada. Sementara itu, kecamatan seperti Cipocok Jaya dan Curug memperlihatkan rasio yang mendekati nol, yang menandakan minimnya fasilitas komunikasi publik di wilayah tersebut. Ketimpangan antarwilayah ini menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap sarana komunikasi publik masih belum merata dan

berpotensi menimbulkan kesenjangan digital, khususnya bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah yang belum memiliki akses internet pribadi.

Secara keseluruhan, tren pada periode 2024–2025 memperlihatkan bahwa wartel hampir tidak lagi berperan sebagai sarana komunikasi publik yang relevan. Keberadaan warnet masih bertahan di beberapa wilayah tertentu, namun dengan jumlah yang terbatas dan tanpa adanya peningkatan yang signifikan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa peran warnet sebagai pusat akses internet bersama juga mulai tergeser oleh meningkatnya penetrasi perangkat mobile dan layanan internet pribadi. Meskipun demikian, warnet masih memiliki fungsi tertentu, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan akses komputer untuk keperluan administrasi, pembelajaran daring, maupun layanan berbasis digital lainnya.

Temuan ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang, untuk melakukan penyesuaian arah kebijakan pengembangan infrastruktur komunikasi dan informatika. Fokus kebijakan ke depan dapat dialihkan dari penyediaan fasilitas komunikasi konvensional menuju pengembangan akses internet publik yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat

saat ini, seperti penyediaan layanan Wi-Fi publik, pengembangan ruang layanan digital terpadu, atau pusat komunitas berbasis teknologi informasi. Selain itu, diperlukan pemetaan lebih lanjut untuk menentukan kecamatan prioritas dalam penyediaan akses digital alternatif, sehingga upaya peningkatan literasi digital, dukungan terhadap kegiatan pendidikan, administrasi publik, serta layanan informasi masyarakat dapat dilakukan secara lebih merata dan berkelanjutan.

Selain itu, kondisi minimnya fasilitas komunikasi publik perlu dilihat dalam konteks transformasi digital yang semakin berkembang. Ketergantungan masyarakat pada akses internet pribadi berpotensi menimbulkan kesenjangan bagi kelompok yang memiliki keterbatasan ekonomi maupun akses teknologi. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah menjadi penting dalam memastikan transformasi digital berjalan secara inklusif, tidak hanya melalui penyediaan infrastruktur, tetapi juga melalui peningkatan literasi digital dan penyediaan akses alternatif yang mudah dijangkau. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan pemerataan akses informasi dan layanan digital bagi masyarakat dapat lebih optimal.

Tabel 4.8. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan Tahun 2024 s.d 2025 Kota Serang

Pada tahun 2024, jumlah total Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kota Serang mencapai 35 kelompok, yang tersebar di enam kecamatan. Angka ini menunjukkan adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyebaran informasi publik berbasis komunitas. KIM menjadi sarana penting bagi masyarakat untuk mengakses, mengelola, serta menyebarluaskan informasi yang bermanfaat, baik mengenai pembangunan daerah, program pemerintah, kegiatan sosial, maupun isu-isu yang berkembang di lingkungan sekitar.

Jika dibandingkan dengan jumlah kelurahan yang ada, yaitu sebanyak 67 kelurahan, maka perkembangan pembentukan KIM secara keseluruhan mencapai 249,03%. Artinya, jumlah KIM yang terbentuk telah melampaui jumlah kelurahan, karena dalam satu kelurahan dapat terbentuk lebih dari satu kelompok KIM. Pencapaian ini menunjukkan bahwa minat masyarakat dalam mengelola informasi semakin meningkat dan KIM semakin aktif berperan di tingkat lokal.

Secara rata-rata, tiap kecamatan mampu membentuk KIM dengan persentase capaian 41,05% dari jumlah kelurahan yang dimiliki oleh masing-masing wilayah. Meski terdapat beberapa kecamatan yang belum mencapai target ideal, seperti Curug yang belum memiliki kelompok KIM pada tahun 2024, kecamatan lainnya menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Kecamatan Walantaka, misalnya, berhasil mencatat persentase tertinggi yaitu mencapai 128,57%, yang menunjukkan tingginya partisipasi dan kesadaran masyarakat setempat terhadap pentingnya pengelolaan informasi publik.

No	Kecamatan	2024		
		Jumlah KIM	Jumlah Kelurahan	%
1	Cipocok Jaya	3	8	37.50
2	Curug	0	10	0.00
3	Kasemen	3	10	30.00
4	Serang	9	12	75.00
5	Taktakan	2	13	15.38
6	Walantaka	18	14	128.57
	Jumlah	35	67	249.03
	Rata-Rata			41.05

Dengan demikian, keberadaan 35 KIM ini bukan hanya menggambarkan capaian kuantitatif, tetapi juga menjadi indikator meningkatnya kapasitas komunikasi masyarakat Kota Serang. Kehadiran KIM diharapkan dapat semakin memperkuat hubungan antara pemerintah dengan masyarakat dalam penyampaian informasi yang transparan, akurat, dan mudah diakses, serta dapat meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat melalui kegiatan literasi informasi

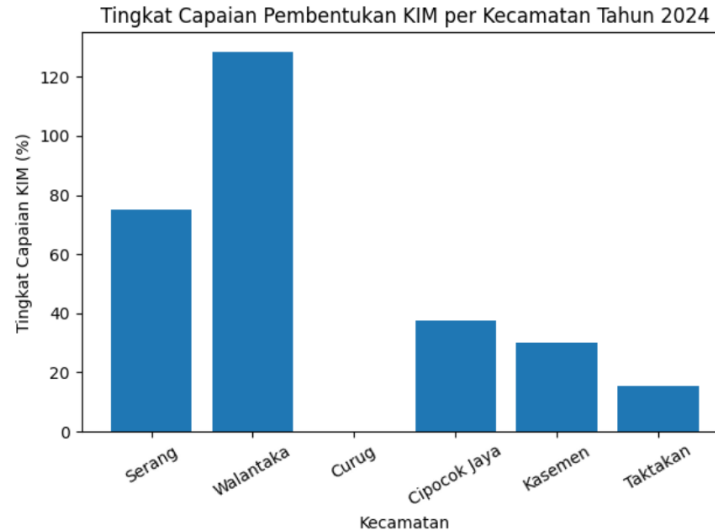
.

Secara lebih rinci:

- Kecamatan Serang memiliki tingkat capaian tertinggi yaitu 75,00% (9 KIM dari 12 kelurahan). Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar kelurahan di Kecamatan Serang telah berhasil membentuk Kelompok Informasi Masyarakat, yang menandakan adanya dukungan kelembagaan serta partisipasi masyarakat yang relatif baik dalam penguatan akses dan penyebaran informasi di tingkat lokal.
- Walantaka menunjukkan angka 128,57%, yang berarti jumlah KIM melebihi jumlah kelurahannya (18 KIM dari 14 kelurahan). Kondisi ini mengindikasikan adanya pembentukan lebih dari satu KIM pada beberapa kelurahan, yang dapat mencerminkan tingginya antusiasme masyarakat serta inisiatif lokal dalam mengembangkan media komunikasi dan informasi berbasis komunitas.
- Curug menjadi satu-satunya kecamatan tanpa pembentukan KIM (0%). Hal ini menandakan bahwa hingga tahun 2024, seluruh kelurahan di Kecamatan Curug belum tersentuh oleh program pembentukan KIM, yang berpotensi dipengaruhi oleh keterbatasan sosialisasi program, dukungan sumber daya, maupun faktor administratif dan kelembagaan.

- Kecamatan lainnya seperti Cipocok Jaya (37,50%), Kasemen (30,00%), dan Taktakan (15,38%) menunjukkan tingkat capaian yang bervariasi. Variasi capaian tersebut menggambarkan adanya perbedaan tingkat kesiapan wilayah, komitmen pemangku kepentingan, serta keterlibatan masyarakat dalam mendukung pembentukan KIM di masing-masing kecamatan.

Secara umum, data ini menunjukkan bahwa distribusi KIM pada tahun 2024 masih belum merata, dengan kecamatan tertentu terlihat lebih dominan dalam pembentukan KIM, sementara sebagian wilayah lainnya masih tertinggal atau bahkan belum tersentuh sama sekali oleh inisiatif tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih terarah untuk mendorong pemerataan pembentukan KIM agar manfaatnya dapat dirasakan secara menyeluruh di seluruh kecamatan.



Berdasarkan data tingkat capaian pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) tahun 2024, dapat terlihat adanya perbedaan yang cukup signifikan antar kecamatan. Kecamatan Walantaka menunjukkan capaian tertinggi dengan persentase sebesar 128,57%. Angka ini mengindikasikan bahwa jumlah KIM yang terbentuk tidak hanya memenuhi jumlah

kelurahan yang ada, tetapi bahkan melebihi, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa wilayah ini memiliki tingkat partisipasi masyarakat serta dukungan pembentukan KIM yang sangat tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan keberhasilan implementasi program KIM di Kecamatan Walantaka dibandingkan wilayah lainnya.

Kecamatan Serang menempati posisi kedua dengan tingkat capaian sebesar 75,00%. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar kelurahan di Kecamatan Serang telah memiliki KIM, meskipun masih terdapat beberapa kelurahan yang belum terjangkau. Hal ini mengindikasikan bahwa proses pembentukan KIM di Kecamatan Serang sudah berjalan dengan cukup baik, namun masih memerlukan penguatan agar cakupannya dapat merata di seluruh kelurahan.

Sebaliknya, Kecamatan Curug menunjukkan capaian terendah dengan persentase 0%, yang berarti hingga tahun 2024 belum terdapat pembentukan KIM di wilayah tersebut. Kondisi ini menandakan adanya kesenjangan yang cukup besar dibandingkan kecamatan lainnya dan menunjukkan perlunya perhatian khusus dari pihak terkait untuk mendorong inisiatif pembentukan KIM di Kecamatan Curug.

Sementara itu, Kecamatan Cipocok Jaya, Kasemen, dan Taktakan memperlihatkan tingkat capaian yang relatif rendah dan bervariasi. Kecamatan Cipocok Jaya memiliki capaian sebesar 37,50%, diikuti Kecamatan Kasemen sebesar 30,00%, dan Kecamatan Taktakan sebesar 15,38%. Persentase ini menunjukkan bahwa pembentukan KIM di ketiga kecamatan tersebut masih terbatas dan belum menjangkau seluruh kelurahan. Perbedaan capaian ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti tingkat kesiapan masyarakat, dukungan kelembagaan, maupun intensitas pendampingan dari pemerintah daerah.

Secara keseluruhan, grafik ini memperlihatkan bahwa distribusi KIM pada tahun 2024 masih belum merata antar kecamatan. Beberapa kecamatan menunjukkan capaian yang sangat tinggi, sementara kecamatan lainnya masih memiliki capaian rendah bahkan belum tersentuh sama sekali. Oleh karena itu, diperlukan strategi pemerataan pembentukan KIM agar seluruh kecamatan dapat memperoleh manfaat yang setara dari keberadaan Kelompok Informasi Masyarakat sebagai sarana penyebaran informasi dan pemberdayaan masyarakat.

Pada tahun 2025, jumlah KIM pada semester I masih sama seperti tahun 2024, yaitu 35 kelompok, sehingga belum terjadi penambahan. Pada semester II, jumlah tersebut meningkat menjadi 54 kelompok, atau bertambah 19 KIM baru, dengan capaian 80,60% terhadap jumlah kelurahan. Peningkatan terjadi di sebagian besar kecamatan, sedangkan Walantaka mengalami penyesuaian data sehingga persentasenya menurun.

2025					
semester I			semester II		
Jumlah KIM	Jumlah	%	Jumlah KIM	Jumlah Kecamatan	%
3	8	37.50	12	8	150.00
0	10	0.00	4	10	40.00
3	10	30.00	11	10	110.00
9	12	75.00	14	12	116.67
2	13	15.38	8	13	61.54
18	14	128.57	5	14	35.71
35	67	249.03	54	67	80.60
		41.05			80.91

Data yang tersaji, diketahui bahwa pada Semester I tahun 2025 jumlah KIM yang terbentuk masih sama dengan capaian tahun 2024, yaitu sebanyak 35 kelompok. Kondisi ini menunjukkan bahwa hingga Semester I belum terjadi penambahan jumlah KIM baru. Namun, pada Semester II tahun 2025 terjadi peningkatan yang cukup signifikan, di mana jumlah KIM bertambah menjadi 54 kelompok atau mengalami penambahan sebanyak 19 KIM baru. Peningkatan tersebut menghasilkan capaian sebesar 80,60% terhadap jumlah kelurahan yang ada, yang menunjukkan adanya percepatan pembentukan KIM pada paruh kedua tahun 2025.

Peningkatan jumlah KIM ini terjadi di sebagian besar kecamatan, yang mengindikasikan adanya upaya penguatan peran KIM di tingkat wilayah. Meskipun demikian, terdapat perbedaan capaian antar kecamatan. Beberapa wilayah menunjukkan persentase capaian yang sangat tinggi, bahkan melebihi 100%, sementara Kecamatan Walantaka mengalami penyesuaian data yang berdampak pada penurunan persentase capaian pada Semester II. Variasi capaian ini mencerminkan bahwa proses pembentukan KIM belum berlangsung secara merata di seluruh wilayah, sehingga diperlukan strategi lanjutan untuk mendorong pemerataan pembentukan KIM agar peran penyebaran informasi dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan lebih optimal di semua kecamatan.

Tabel 4.9. Cakupan layanan telekomunikasi Tahun 2024 s.d 2025 Kota Serang

Pada tahun 2024, seluruh kecamatan di Kota Serang telah mencapai cakupan layanan KIM sebesar 100%, yang berarti bahwa seluruh wilayah administrasi Kota Serang telah berada dalam jangkauan layanan informasi masyarakat berbasis komunitas. Hal ini menunjukkan keberhasilan yang sangat signifikan dalam pemerataan akses layanan informasi publik, di mana tidak ada satu pun wilayah kelurahan yang tertinggal atau tidak terjangkau oleh penyebaran informasi melalui KIM. Total luas wilayah yang terjangkau layanan KIM pada tahun tersebut mencapai 266,74 km², sesuai dengan luas administrasi Kota Serang secara keseluruhan. Dengan demikian, capaian ini menandakan bahwa pembentukan ekosistem komunikasi masyarakat telah mampu menjangkau hingga batas terluar wilayah kecamatan dan kelurahan yang ada, tanpa menyisakan area kosong dalam persebaran jaringan komunikasi.

Capaian layanan yang merata ini menunjukkan kemajuan komunikasi publik di Kota Serang, di mana pemerintah mampu memastikan kesetaraan akses informasi bagi seluruh masyarakat. Meskipun jumlah kelompok KIM berbeda di setiap kecamatan, perbedaan tersebut

tidak memengaruhi cakupan wilayah layanan. Kecamatan dengan jumlah KIM sedikit seperti Curug dan Kasemen tetap memiliki capaian 100% seperti kecamatan dengan jumlah KIM lebih banyak, misalnya Walantaka. Hal ini membuktikan bahwa pemerataan informasi tidak hanya bergantung pada jumlah KIM, tetapi juga dipengaruhi oleh efektivitas kelembagaan, koordinasi wilayah, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Selain itu, pencapaian 100% cakupan layanan wilayah pada tahun 2024 turut memberikan gambaran mengenai kesiapan Kota Serang untuk memasuki era transformasi digital dalam layanan publik. Dengan seluruh wilayah sudah berada dalam jangkauan informasi, maka peluang untuk mengembangkan sistem komunikasi berbasis digital menjadi semakin terbuka. Pemerataan akses ini menjadi pondasi utama dalam mendukung program literasi media masyarakat, peningkatan kapasitas warga dalam mengelola informasi, serta penguatan peran masyarakat sebagai mitra strategis pemerintah dalam penyebaran informasi pembangunan.

Jika dicermati lebih jauh, pencapaian cakupan layanan hingga 100% di seluruh kecamatan memperlihatkan bahwa Kota Serang telah berhasil membangun struktur jaringan komunikasi yang mumpuni dan berkelanjutan. Bahkan pada kecamatan dengan luasan wilayah yang besar seperti Kasemen dan Curug, layanan informasi KIM tetap mampu menjangkau seluruh wilayah tanpa hambatan geografis. Hal ini menunjukkan bahwa strategi pembentukan KIM tidak hanya difokuskan pada kuantitas kelompok, tetapi juga pada optimalisasi fungsi kelembagaan informasi yang ada agar mampu menjangkau seluruh masyarakat di setiap wilayah.

Keberhasilan ini juga mengindikasikan adanya dukungan pemerintah daerah dalam penyebaran informasi pembangunan kota secara transparan dan merata. Dengan kemampuan menjangkau seluruh wilayah administrasi, maka proses penyebaran informasi tidak lagi terpusat pada wilayah perkotaan saja, tetapi telah meluas sampai ke wilayah pinggiran dan kelurahan terpencil. Kondisi ini tentunya menjadi indikator kuat bahwa penyelenggaraan layanan informasi publik di Kota Serang sudah berjalan pada arah yang sangat positif.

Dengan tercapainya pemerataan cakupan ini, maka tantangan pembangunan komunikasi pada tahun-tahun berikutnya tidak lagi terletak pada perluasan wilayah layanan, melainkan pada peningkatan kualitas KIM, penguatan kapasitas kelembagaan, dan optimalisasi efektivitas penyampaian informasi kepada masyarakat.

No	Kecamatan	2024		
		Luas wilayah yang terconverge	Luas wilayah kelurahan	%
1	Cipocok Jaya	31.54	31.54	100%
2	Curug	49.60	49.60	100%
3	Kasemen	63.36	63.36	100%
4	Serang	25.88	25.88	100%
5	Taktakan	47.88	47.88	100%
6	Walantaka	48.48	48.48	100%
	Jumlah	266.74	266.74	100%

Tahun 2025, capaian cakupan layanan wilayah KIM di Kota Serang menunjukkan kestabilan dan konsistensi yang sangat baik. Data pada semester I dan II memperlihatkan bahwa seluruh kecamatan kembali mencatatkan capaian wilayah terlayani sebesar 100% dengan luas layanan yang sama, yakni 266,74 km². Kondisi ini mengindikasikan bahwa keberhasilan mencapai 100% cakupan layanan di tahun sebelumnya bukanlah pencapaian sementara, melainkan capaian yang mampu dipertahankan secara berkelanjutan.

Selain itu, fakta bahwa luas wilayah terlayani pada semester I tidak berbeda dengan semester II menunjukkan bahwa tidak ada gangguan atau perubahan struktural dalam layanan informasi publik selama tahun berjalan. Tidak terjadi penyusutan wilayah, pemerataan ulang area layanan, maupun gangguan administratif yang menyebabkan wilayah tertentu keluar dari jangkauan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jaringan komunikasi berbasis KIM telah mencapai tingkat kestabilan yang kuat pada tahun 2025.

Keberlanjutan ini juga merupakan bukti konkret bahwa eksistensi KIM telah mampu memberikan dampak positif yang luas, tidak hanya pada pemerataan wilayah layanan tetapi juga pada aspek koordinasi antar-kecamatan dan interaksi komunikasi sosial yang terbentuk melalui jaringan informasi tersebut. Capaian ini menjadi salah satu pilar penting dalam

mendukung pembangunan komunikasi masyarakat, terutama untuk tujuan penyebaran program pemerintah, peningkatan literasi informasi, dan penyediaan layanan komunikasi modern berbasis digital.

2025					
semester I			semster II		
Luas wilayah terconverage	Luas wilayah kelurahan	%	Luas wilayah yang terconverage	Luas wilayah kelurahan	%
31.54	31.54	100%	31.54	31.54	100%
49.60	49.60	100%	49.60	49.60	100%
63.36	63.36	100%	63.36	63.36	100%
25.88	25.88	100%	25.88	25.88	100%
47.88	47.88	100%	47.88	47.88	100%
48.48	48.48	100%	48.48	48.48	100%
266.74	266.74	100%	266.74	266.74	100%

Konsistensi pencapaian cakupan 100% sepanjang dua semester di tahun 2025 juga memperlihatkan bahwa pembentukan kelompok KIM tidak lagi sebatas menambah jumlah kelompok, tetapi telah diarahkan pada penyempurnaan tata kelola komunikasi dan pembentukan jaringan informasi yang berkualitas. Walaupun pada tahun ini terdapat dinamika jumlah KIM di beberapa kecamatan, perubahan tersebut tidak memengaruhi luas wilayah yang terjangkau layanan KIM. Hal ini membuktikan bahwa keberadaan KIM yang sudah ada telah bekerja secara optimal dan menjadi penghubung komunikasi masyarakat yang efektif.

Selain itu, stabilitas layanan selama dua semester berturut-turut menjadi indikator bahwa pemerintah daerah telah mampu menjaga keberlanjutan sistem komunikasi publik yang inklusif dan merata. Bahkan kenyataan bahwa capaian wilayah tidak berubah antarsemester menggambarkan kemampuan distribusi informasi yang sangat stabil, baik dari sisi teknis, kelembagaan, maupun infrastruktur.

Dengan kondisi capaian wilayah yang telah maksimal dan stabil dari tahun ke tahun, maka fokus pembangunan komunikasi selanjutnya dapat diarahkan pada peningkatan kapasitas anggota KIM, pembentukan jaringan digital modern, sistem data informasi, penyediaan konten edukasi publik yang informatif, hingga penguatan peran KIM sebagai mitra strategis

pemerintah dalam mendukung keterbukaan informasi publik dan transparansi pembangunan daerah. Dengan demikian, pencapaian cakupan wilayah KIM di Kota Serang selama tahun 2024 hingga 2025 dapat dianggap sebagai fondasi kuat untuk pengembangan komunikasi sosial berbasis masyarakat di tahun-tahun berikutnya.

Tabel 4.10. Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet Tahun 2024 s.d 2025 Kota Serang

Data pada tahun 2024 menunjukkan bahwa hampir seluruh rumah tangga di Kota Serang telah memiliki akses internet. Dari total 177.028 rumah tangga, tercatat 176.538 rumah memiliki akses internet atau setara dengan 99,72%, sehingga persentase ini menggambarkan kondisi Kota Serang yang sangat maju dalam pemanfaatan jaringan digital. Seluruh kecamatan sudah mencapai angka 100% akses internet rumah tangga, kecuali Kecamatan Curug yang masih berada pada nilai 98,04%.

Capaian ini memperlihatkan bahwa ketersediaan dan pemanfaatan jaringan internet telah merata di Kota Serang, bahkan di wilayah yang memiliki jumlah penduduk terbanyak. Data ini juga menggambarkan keberhasilan pemerataan jaringan internet baik melalui penyedia layanan internet maupun bantuan infrastruktur pemerintah yang mendukung peningkatan akses digital masyarakat.

No	Kecamatan	2024		
		Jumlah rumah	Jumlah Rumah	%
1	Cipocok Jaya	14,553	14,553	100.00
2	Curug	24,544	25,034	98.04
3	Kasemen	24,981	24,981	100.00
4	Serang	60,957	60,957	100.00
5	Taktakan	25,070	25,070	100.00
6	Walantaka	26,433	26,433	100.00
	Jumlah	176,538	177,028	99.72

Tingginya angka capaian penetrasi internet pada tahun 2024 menjadi salah satu indikator bahwa Kota Serang sedang menuju transformasi digital yang lebih matang. Sebaran akses internet tidak menunjukkan disparitas antar wilayah, bahkan kecamatan yang memiliki penduduk padat seperti Serang dan Kasemen mampu mencapai tingkat penetrasi 100%. Keberhasilan ini tidak hanya mengindikasikan kemajuan teknologi, tetapi juga memperlihatkan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan akses informasi online.

Dengan demikian, tahun 2024 tampil sebagai momentum penting dalam perkembangan konektivitas digital, dimana mayoritas rumah tangga telah mampu mengakses layanan internet secara mandiri sebagai sarana pendukung aktivitas pendidikan, ekonomi, jasa, hingga komunikasi sosial masyarakat sehari-hari.

2025					
semester I			semester II		
Jumlah	Jumlah Rumah	%	Jumlah rumah	Jumlah Rumah	%
14,553	14,553	100.00	19,326	21,006	92.00
24,544	25,034	98.04	10,758	12,509	86.00
24,981	24,981	100.00	20,192	22,189	91.00
60,957	60,957	100.00	49,430	50,336	98.20
25,070	25,070	100.00	19,814	21,078	94.00
26,433	26,433	100.00	19,366	21,050	92.00
176,538	177,028	99.7	138,886	148,168	93.7

Pada tahun 2025 semester I, proporsi rumah tangga yang memiliki akses internet tetap kuat seperti tahun sebelumnya, dengan capaian 99,70% atau sebanyak 176.538 rumah tangga. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan jaringan maupun kemampuan masyarakat untuk berlangganan layanan masih sangat tinggi. Namun kondisi berubah ketika memasuki semester II, dimana persentase rumah tangga berakses internet menurun menjadi 93,70%, hanya sebanyak 138.886 rumah tangga dari total 148.168 rumah.

Penurunan ini terjadi di seluruh kecamatan, tetapi skala penurunannya berbeda-beda. Kecamatan Serang dan Taktakan masih menunjukkan persentase yang lebih baik dibandingkan kecamatan lainnya. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh dinamika sosial ekonomi, perpindahan penduduk, perubahan biaya layanan internet, hingga faktor teknis jaringan yang mampu memengaruhi penggunaan layanan pada masyarakat.

Penurunan proporsi rumah tangga pengguna internet pada semester II tahun 2025 menjadi indikator penting yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah. Hal tersebut menunjukkan adanya tantangan baru terkait keberlangsungan akses internet masyarakat, meskipun dari sisi cakupan wilayah infrastruktur tidak mengalami perubahan. Penurunan pengguna internet ini dapat menjadi tanda bahwa masyarakat mengalami tekanan finansial

sehingga tidak seluruh rumah tangga dapat mempertahankan akses berlangganan internet bulanannya.

Dan Penurunan dapat terjadi akibat perpindahan penduduk, terutama dari rumah tangga sementara, kontrakan, atau pekerja luar daerah yang meninggalkan lokasi. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi kebijakan, khususnya pada tarif layanan internet publik berbasis kelurahan atau kawasan padat penduduk. Pemeliharaan infrastruktur serta penyediaan alternatif layanan internet murah juga diperlukan agar tingkat penggunaan internet kembali stabil seperti di tahun 2024.

Tabel 4.11. Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi Tahun 2024 s.d 2025 Kota Serang

Menyajikan gambaran mengenai proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi di Kota Serang pada tahun 2024, yang dirinci berdasarkan enam kecamatan, yaitu Cipocok Jaya, Curug, Kasemen, Serang, Taktakan, dan Walantaka. Data dalam tabel ini mencakup jumlah rumah tangga yang memiliki komputer pribadi, total jumlah rumah tangga di setiap kecamatan, serta persentase kepemilikan komputer pribadi terhadap keseluruhan rumah tangga.

Penyajian data ini bertujuan untuk memberikan gambaran awal mengenai tingkat penetrasi perangkat teknologi komputer di tingkat rumah tangga pada masing-masing kecamatan. Kepemilikan komputer pribadi menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur akses masyarakat terhadap teknologi informasi, yang berperan besar dalam mendukung kegiatan pendidikan, pekerjaan, administrasi, serta pemanfaatan layanan digital lainnya. Oleh karena itu, data ini menjadi dasar penting dalam memahami kondisi kesiapan digital masyarakat Kota Serang pada tahun 2024.

No	Kecamatan	2024		
		Jumlah Rumah	Jumlah Rumah	%
1	Cipocok Jaya	14.040	14.553	96.47
2	Curug	1.437	25.034	5.74
3	Kasemen	8.616	24.981	34.49
4	Serang	24.207	60.957	39.71
5	Taktakan	4.660	25.070	18.59
6	Walantaka	1.481	26.433	5.60
	Jumlah	054.441	177.028	30.75

Data yang tersaji dalam Tabel 4.11, dapat diketahui bahwa tingkat kepemilikan komputer pribadi di Kota Serang pada tahun 2024 masih tergolong rendah, dengan total kepemilikan sebesar 54.441 rumah tangga dari 177.028 rumah tangga, atau setara dengan 30,75%. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh rumah tangga di Kota Serang belum memiliki komputer pribadi sebagai sarana pendukung aktivitas berbasis teknologi informasi.

Jika ditinjau berdasarkan wilayah kecamatan, Kecamatan Cipocok Jaya memiliki jumlah rumah tangga yang memiliki komputer pribadi paling tinggi secara persentase, yaitu sebesar 96,47%, diikuti oleh Kecamatan Serang dengan persentase 39,71%, dan Kecamatan Kasemen sebesar 34,49%. Tingginya persentase di beberapa kecamatan ini dapat dipengaruhi oleh faktor kepadatan penduduk, tingkat ekonomi masyarakat, serta ketersediaan infrastruktur pendukung teknologi.

Sementara itu, Kecamatan Taktakan dan Walantaka menunjukkan persentase kepemilikan yang relatif lebih rendah, masing-masing sebesar 18,59% dan 5,60%. Rendahnya angka kepemilikan komputer pribadi di kecamatan tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan akses teknologi antarwilayah di Kota Serang. Kondisi ini dapat menjadi perhatian bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pemerataan akses teknologi dan peningkatan literasi digital masyarakat.

Perkembangan kepemilikan komputer pribadi rumah tangga di Kota Serang pada tahun 2025 disajikan secara lebih rinci dengan membaginya ke dalam dua periode waktu, yaitu Semester I dan Semester II. Pembagian periode ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi kepemilikan komputer pribadi di tingkat rumah tangga sepanjang tahun, sekaligus memudahkan dalam mengamati dinamika perubahan yang terjadi. Data yang disajikan dalam tabel mencakup jumlah rumah tangga yang memiliki komputer pribadi, total jumlah rumah tangga, serta persentase kepemilikan komputer pribadi pada masing-masing semester, sehingga informasi yang diperoleh bersifat kuantitatif dan terukur.

Penyajian data secara periodik ini bertujuan untuk mengidentifikasi perubahan dan tren kepemilikan komputer pribadi dari waktu ke waktu, khususnya dalam rentang satu tahun berjalan. Dengan membandingkan data antara Semester I dan Semester II, dapat diketahui apakah terjadi peningkatan, penurunan, atau kondisi yang relatif stabil dalam kepemilikan komputer pribadi di Kota Serang. Analisis semacam ini menjadi penting untuk memahami sejauh mana masyarakat mampu mempertahankan atau meningkatkan akses terhadap perangkat teknologi informasi di tengah berbagai perubahan kondisi sosial dan ekonomi.

Selain itu, pembagian data berdasarkan semester juga memungkinkan dilakukannya analisis yang lebih mendalam terhadap pola pemanfaatan teknologi komputer di tingkat rumah tangga. Perubahan angka kepemilikan yang terjadi pada masing-masing semester dapat mencerminkan berbagai faktor, seperti kemampuan ekonomi masyarakat, pergeseran preferensi penggunaan perangkat teknologi, maupun dampak kebijakan dan program pemerintah yang berkaitan dengan digitalisasi. Oleh karena itu, data ini tidak hanya berfungsi sebagai informasi statistik semata, tetapi juga sebagai dasar dalam mengevaluasi kondisi dan arah perkembangan akses teknologi komputer di Kota Serang selama tahun 2025.

2025					
semester I			semester II		
Jumlah Rumah	Jumlah Rumah	%	Jumlah Rumah	Jumlah Rumah	2024 s.d
14.040	14.553	96.47	1,059	21,006	5.04
1.437	25.034	5.74	1,051	12,509	8.40
8.616	24.981	34.49	5,592	22,189	25.20
24.207	60.957	39.71	16,042	50,336	31.87
4.660	25.070	18.59	532	21,078	2.52
1.481	26.433	5.60	525	21,050	2.49
054	177	30.75	24,801	148,168	16.7

Pada Semester I Tahun 2025, tingkat kepemilikan komputer pribadi di Kota Serang tercatat sebesar 30,75%, dengan jumlah 54.441 rumah tangga yang memiliki komputer pribadi dari total 177.028 rumah tangga. Angka ini menunjukkan bahwa kondisi kepemilikan komputer pribadi pada awal tahun 2025 relatif tidak mengalami perubahan signifikan dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2024.

Namun, pada Semester II Tahun 2025, terjadi penurunan yang cukup signifikan dalam kepemilikan komputer pribadi, yaitu menjadi 16,7% atau sebanyak 24.801 rumah tangga dari total 148.168 rumah tangga. Penurunan ini terlihat merata di seluruh kecamatan, yang mengindikasikan adanya faktor-faktor tertentu yang memengaruhi berkurangnya kepemilikan komputer pribadi di tingkat rumah tangga, seperti perubahan kondisi ekonomi, pergeseran penggunaan perangkat ke teknologi lain (misalnya ponsel pintar), atau faktor sosial lainnya.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa kepemilikan komputer pribadi di Kota Serang masih menghadapi tantangan, baik dari segi pemerataan antarwilayah maupun keberlanjutan kepemilikan dari waktu ke waktu. Hasil analisis ini dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan program yang bertujuan untuk meningkatkan akses teknologi informasi, khususnya melalui penyediaan fasilitas pendukung dan peningkatan literasi digital masyarakat.

Tabel 4.12. Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi Tahun 2024 s.d 2025 Kota Serang

Informasi mengenai proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi di Kota Serang pada periode tahun 2024 hingga 2025, yang disajikan secara komparatif berdasarkan tahun 2024, Semester I tahun 2025, dan Semester II tahun 2025. Data pada tabel ini dirinci menurut kecamatan, sehingga memungkinkan analisis kondisi kepemilikan komputer pribadi secara lebih spesifik pada masing-masing wilayah administrasi di Kota Serang.

Informasi yang disajikan dalam tabel mencakup jumlah rumah tangga yang memiliki komputer pribadi, jumlah total rumah tangga, serta persentase kepemilikan komputer pribadi pada setiap periode waktu. Penyajian data dalam beberapa periode ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai perkembangan dan perubahan tingkat kepemilikan komputer pribadi dari waktu ke waktu, sekaligus sebagai dasar untuk melihat kecenderungan peningkatan atau penurunan akses teknologi komputer di tingkat rumah tangga.

No	Kecamatan	2024			2025					
		Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah	jumlah total perangkat daerah	%	semester I			semester II		
					Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah	jumlah total perangkat daerah	%	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah	jumlah total perangkat daerah	%
1	Cipocok Jaya	8	9	89%	9	9	100%	9	9	100%
2	Curug	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%
3	Kasemen	1	2	50%	2	2	100%	2	2	100%
4	Serang	9	18	50%	11	18	61%	16	18	89%
5	Taktakan	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%
6	Walantaka	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%
	Jumlah	21	32	65.63%	25	32	0%	30	32	93.8

Berdasarkan data yang tersaji dalam Tabel 4.12, dapat diketahui bahwa kepemilikan komputer pribadi rumah tangga di Kota Serang menunjukkan dinamika perubahan dari tahun 2024 hingga Semester II tahun 2025. Pada tahun 2024, total rumah tangga yang memiliki komputer pribadi tercatat sebanyak 54.441 rumah tangga dari 177.028 rumah tangga, atau

sebesar 30,75%. Angka ini menggambarkan bahwa pada periode tersebut, kepemilikan komputer pribadi masih terbatas dan belum merata di seluruh wilayah Kota Serang.

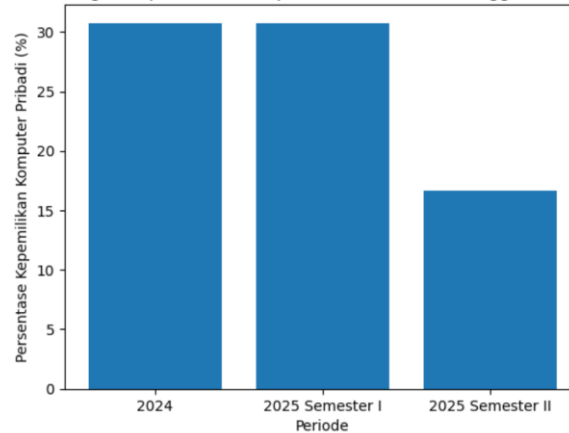
Memasuki Semester I tahun 2025, tingkat kepemilikan komputer pribadi secara umum tidak mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Persentase kepemilikan masih berada pada kisaran yang sama, menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap komputer pribadi relatif stagnan pada awal tahun 2025. Kondisi ini mengindikasikan bahwa belum terdapat faktor pendorong yang cukup kuat untuk meningkatkan kepemilikan komputer pribadi secara signifikan dalam jangka waktu tersebut.

Namun demikian, pada Semester II tahun 2025 terlihat adanya penurunan tingkat kepemilikan komputer pribadi di Kota Serang. Jumlah rumah tangga yang memiliki komputer pribadi menurun menjadi 24.801 rumah tangga dari total 148.168 rumah tangga, dengan persentase sebesar 16,7%. Penurunan ini terjadi hampir di seluruh kecamatan, yang menunjukkan adanya kecenderungan penurunan akses terhadap perangkat komputer pribadi secara merata.

Penurunan tingkat kepemilikan komputer pribadi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain perubahan kondisi ekonomi rumah tangga, pergeseran preferensi penggunaan perangkat teknologi ke arah perangkat lain seperti telepon pintar, serta kebutuhan komputasi yang semakin dapat dipenuhi melalui perangkat mobile. Dengan demikian, data pada Tabel 4.12 menunjukkan bahwa meskipun komputer pribadi masih menjadi salah satu perangkat penting, perannya di tingkat rumah tangga mengalami tantangan dalam hal keberlanjutan kepemilikan.

Secara keseluruhan, Tabel 4.12 memberikan gambaran bahwa kepemilikan komputer pribadi di Kota Serang belum menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, bahkan cenderung mengalami penurunan pada Semester II tahun 2025. Hasil analisis ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait dalam merumuskan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan pemanfaatan teknologi informasi di tingkat rumah tangga, khususnya dalam rangka mendukung transformasi digital dan peningkatan literasi teknologi masyarakat.

Perkembangan Kepemilikan Komputer Pribadi Rumah Tangga di Kota Serang



Perkembangan persentase kepemilikan komputer pribadi rumah tangga di Kota Serang pada periode tahun 2024, Semester I tahun 2025, dan Semester II tahun 2025. Sumbu horizontal menggambarkan periode waktu, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan persentase kepemilikan komputer pribadi.

Berdasarkan diagram, terlihat bahwa pada tahun 2024 persentase kepemilikan komputer pribadi berada pada angka 30,75%. Nilai yang sama juga tercatat pada Semester I tahun 2025, yang mengindikasikan bahwa pada awal tahun 2025 belum terjadi perubahan yang signifikan dalam tingkat kepemilikan komputer pribadi di tingkat rumah tangga.

Namun, pada Semester II tahun 2025, diagram menunjukkan adanya penurunan yang cukup tajam, di mana persentase kepemilikan komputer pribadi turun menjadi 16,7%. Penurunan ini mencerminkan berkurangnya jumlah rumah tangga yang memiliki komputer pribadi pada paruh kedua tahun 2025 dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Secara keseluruhan, diagram batang ini mempertegas hasil analisis tabel sebelumnya bahwa kepemilikan komputer pribadi rumah tangga di Kota Serang belum menunjukkan tren peningkatan yang berkelanjutan, bahkan mengalami penurunan pada Semester II tahun 2025. Visualisasi ini memudahkan pembaca dalam memahami perubahan data secara cepat dan memperkuat interpretasi terhadap kondisi akses teknologi komputer di Kota Serang.

Tabel 4.13 Presentase Rumah Tangga yang Menggunakan HP/Telepon Tahun 2024 s.d 2025 Kota Serang

persentase rumah tangga yang menggunakan HP/telepon di Kota Serang pada periode tahun 2024 hingga 2025. Data ini menggambarkan tingkat pemanfaatan alat komunikasi oleh masyarakat, baik melalui telepon seluler (HP) maupun jaringan telepon rumah (PSTN), sebagai sarana utama dalam melakukan komunikasi sehari-hari. Informasi yang disajikan dalam tabel mencakup jumlah penduduk yang memiliki HP, jumlah penduduk yang menggunakan PSTN, total penduduk yang memiliki akses terhadap alat komunikasi, serta jumlah penduduk secara keseluruhan.

Penyajian data dilakukan secara komparatif antara tahun 2024, Semester I tahun 2025, dan Semester II tahun 2025, sehingga memungkinkan dilakukannya analisis perkembangan pemanfaatan alat komunikasi dari waktu ke waktu. Persentase kepemilikan alat komunikasi pada tabel ini dihitung berdasarkan perbandingan antara total penduduk yang memiliki HP dan/atau PSTN dengan jumlah penduduk pada periode yang bersangkutan. Dengan demikian, tabel ini memberikan gambaran yang

jelas mengenai tingkat akses masyarakat Kota Serang terhadap perangkat komunikasi pribadi.

No	Uraian	2024	2025	
			Semester I	Semester II
1	2	3	4	5
1	Penduduk yang memiliki HP	697,599	697,599	694,843
2	Penduduk yang memiliki PSTN	34,701	34,701	34,701
3	Total Jumlah penduduk yang memiliki HP/TLP (1+2)	732,300	732,300	729,544
4	Jumlah Penduduk	735,651	735,651	729,544
5	Persentase (3)/(4)	99.54	99.54	96

Data yang tersaji dalam Tabel 4.13, dapat diketahui bahwa tingkat penggunaan HP/telepon di Kota Serang berada pada kategori sangat tinggi sepanjang periode tahun 2024 hingga Semester I tahun 2025. Pada tahun 2024, persentase penggunaan alat komunikasi tercatat sebesar 99,54%, yang menunjukkan bahwa hampir seluruh penduduk Kota Serang telah memiliki akses terhadap perangkat komunikasi, baik melalui telepon seluler maupun jaringan PSTN. Kondisi yang sama juga terlihat pada Semester I tahun 2025, di mana persentase penggunaan alat komunikasi tetap berada pada angka 99,54%, menandakan stabilitas akses komunikasi di masyarakat.

Namun, pada Semester II tahun 2025, terjadi penurunan persentase penggunaan HP/telepon menjadi 96%. Meskipun mengalami penurunan, angka tersebut masih mencerminkan tingkat akses komunikasi yang sangat tinggi dan merata di Kota Serang. Penurunan ini dapat dipengaruhi oleh perubahan jumlah penduduk atau faktor administratif lainnya, bukan semata-mata menunjukkan berkurangnya kebutuhan masyarakat terhadap alat komunikasi.

Secara keseluruhan, ini menunjukkan bahwa akses masyarakat Kota Serang terhadap alat komunikasi sudah sangat baik dan relatif stabil, sehingga dapat dikatakan bahwa perangkat komunikasi telah menjadi kebutuhan dasar bagi sebagian besar penduduk. Data ini juga mengindikasikan bahwa dari sisi ketersediaan dan pemanfaatan alat komunikasi, masyarakat Kota Serang telah berada pada kondisi yang mendukung pelaksanaan aktivitas sosial, ekonomi, dan pelayanan publik berbasis komunikasi dan teknologi informasi.



Dan Persentase rumah tangga yang menggunakan HP/telepon di Kota Serang pada periode tahun 2024, Semester I tahun 2025, dan Semester II tahun 2025. Diagram ini digunakan untuk memvisualisasikan tingkat pemanfaatan alat komunikasi oleh masyarakat Kota Serang secara lebih sederhana dan mudah dipahami.

Berdasarkan diagram diatas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2024 persentase penggunaan HP/telepon berada pada angka 99,54%. Persentase ini tetap stabil pada Semester I tahun 2025, yang menunjukkan bahwa hampir seluruh penduduk Kota Serang telah memiliki akses terhadap alat komunikasi pribadi, baik melalui telepon seluler maupun jaringan telepon rumah (PSTN).

Namun, pada Semester II tahun 2025, diagram menunjukkan adanya penurunan persentase penggunaan HP/telepon menjadi 96%. Meskipun terjadi penurunan,

nilai tersebut masih tergolong sangat tinggi, yang menandakan bahwa akses masyarakat terhadap alat komunikasi di Kota Serang tetap luas dan merata. Penurunan ini dapat disebabkan oleh perubahan jumlah penduduk atau faktor administratif lainnya, bukan semata-mata karena berkurangnya kepemilikan perangkat komunikasi.

Secara keseluruhan, diagram batang ini menegaskan bahwa tingkat penggunaan HP/telepon di Kota Serang berada pada kategori sangat tinggi dan relatif stabil sepanjang periode 2024 hingga 2025. Visualisasi ini memperkuat hasil analisis tabel sebelumnya serta menunjukkan bahwa perangkat komunikasi telah menjadi kebutuhan dasar bagi hampir seluruh masyarakat Kota Serang.

Tabel 4.14 Jumlah Surat Kabar Nasional dan Lokal
Tahun 2024–2025

Jumlah surat kabar nasional dan surat kabar lokal yang beroperasi atau terdistribusi di Kota Serang selama tahun 2024 dan 2025. Data menunjukkan bahwa terdapat 5 surat kabar nasional dan 5 surat kabar lokal, baik pada tahun 2024 maupun pada Semester I dan Semester II tahun 2025, sehingga totalnya konsisten berada pada angka 10 surat kabar.

No	Uraian	2024	2025	
			Semester I	Semester II
1	Jumlah Surat Kabar Terbitan Nasional	5	5	5
2	Jumlah Surat Kabar Terbitan Lokal	5	5	5
3	Total Surat Kabar	10	10	10

Jumlah yang relatif stabil ini menunjukkan bahwa ekosistem media cetak di Kota Serang masih bertahan meskipun mengalami tekanan besar dari pergeseran konsumsi informasi ke media digital. Keberadaan lima surat kabar lokal memiliki relevansi penting dalam

penyampaian informasi yang bersifat regional dan berkonteks lokal, seperti kebijakan pemerintah kota, agenda pembangunan, layanan publik, dan isu masyarakat setempat. Sementara itu, surat kabar nasional lebih banyak memuat isu makro dan berskala nasional, tetapi tetap menjadi rujukan penting bagi sebagian kelompok masyarakat.

Kendati jumlah media cetak masih stabil, tren global menunjukkan bahwa konsumsi informasi berbasis digital semakin dominan. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah perlu memanfaatkan keberadaan surat kabar lokal sebagai salah satu mitra komunikasi, namun tetap memperkuat strategi penyebaran informasi melalui kanal digital seperti website resmi pemerintah, media sosial, serta platform komunikasi publik daring. Kolaborasi dengan surat kabar lokal juga tetap strategis untuk menjangkau kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya beralih ke media digital, termasuk komunitas lansia dan masyarakat yang tinggal di wilayah dengan keterbatasan akses internet.

Dengan demikian, tabel ini memberikan gambaran bahwa media cetak lokal dan nasional masih berperan dalam ekosistem informasi publik di Kota Serang, meskipun perlu diimbangi dengan penguatan strategi komunikasi digital untuk memastikan jangkauan informasi yang lebih luas, cepat, dan relevan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Tabel 4.15 Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal Tahun 2023–2024

Jumlah penyiaran radio lokal, radio nasional, dan televisi lokal yang aktif pada tahun 2023 serta Semester I dan Semester II tahun 2024. Berdasarkan data yang ditampilkan, jumlah penyiaran radio lokal berada pada kisaran 9–8 siaran, sementara jumlah penyiaran radio nasional stabil pada angka 26 siaran. Penyiaran televisi lokal stabil di angka 8 siaran, dan terdapat satu baris tambahan dengan nilai 17 siaran.

No	Uraian	2024	2025	
			Semester I	Semester II
1	Jumlah penyiaran radio lokal	9	9	8
2	Jumlah penyiaran radio nasional	26	26	26
3	Jumlah penyiaran TV lokal	8	8	8
4	Jumlah penyiaran TV nasional	17	17	17

Dari data tersebut terlihat bahwa penyiaran radio tingkat nasional mendominasi distribusi informasi melalui media penyiaran di Kota Serang. Dominasi ini

wajar karena stasiun penyiaran nasional memiliki jangkauan yang lebih luas, sumber daya lebih besar, serta distribusi konten yang lebih stabil. Namun, keberadaan penyiaran lokal, baik radio maupun televisi, tetap memiliki fungsi penting dalam menyampaikan informasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat daerah, seperti kebijakan pemerintah kota, informasi layanan publik, program daerah, serta isu sosial dan budaya lokal.

Penurunan kecil jumlah penyiaran radio lokal dari 9 menjadi 8 pada 2024 dapat menjadi indikasi adanya tantangan dalam keberlangsungan operasional media lokal, baik dari sisi pendanaan, sumber daya manusia, maupun kompetisi dengan platform digital. Kondisi ini perlu menjadi perhatian pemerintah daerah karena penyiaran lokal berperan sebagai kanal komunikasi yang lebih dekat dengan masyarakat dan dapat dioptimalkan sebagai media sosialisasi kebijakan daerah.

Pemerintah daerah perlu memperkuat kerja sama dengan media penyiaran lokal melalui penyediaan konten layanan publik, kampanye edukatif, serta dukungan pelatihan dan regulasi. Meskipun media nasional masih dominan, media lokal tetap berperan penting dalam komunikasi publik daerah dan berpotensi meningkatkan keterjangkauan informasi serta kedekatan kebijakan pemerintah dengan masyarakat Kota Serang..

Tabel 4.16 Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan Tahun 2024 s.d 2025 Kota Serang

No	Uraian	2024	2025	
			Semester I	Semester II
1	Jumlah KIM	35	54	54
2	Jumlah Kecamatan yang ada dalam kab/kota	6	67	67
3	Persentase	583.33	80.60	80.60

Tabel tersebut menggambarkan perkembangan jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kota Serang pada tahun 2024 hingga tahun 2025. Pada tahun 2024, jumlah KIM tercatat sebanyak 35 kelompok, kemudian meningkat signifikan pada tahun 2025 menjadi 54 kelompok pada Semester I, dan jumlah tersebut tetap stabil hingga Semester II 2025. Kenaikan jumlah KIM menunjukkan adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyebaran dan pemanfaatan informasi, khususnya dalam mendukung keterbukaan informasi publik dan literasi digital di tingkat kelurahan.

Sebagai perbandingan terhadap satuan wilayah administratif, jumlah kecamatan yang menjadi cakupan program KIM adalah 6 kecamatan di seluruh Kota Serang. Berdasarkan perbandingan jumlah KIM dengan cakupan wilayah tersebut, persentase perkembangan KIM mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu dari 583,33% pada tahun 2024 menjadi 80,60% pada Semester I dan tetap stabil pada Semester II 2025. Persentase ini menunjukkan bahwa jumlah KIM telah jauh melampaui jumlah kecamatan yang menjadi unit wilayah binaan, yang berarti KIM tidak hanya terbentuk di tingkat kecamatan tetapi juga telah menyebar hingga ke seluruh kelurahan.

Perkembangan ini mencerminkan adanya penguatan peran masyarakat dalam ekosistem informasi daerah, serta berpotensi mempercepat transformasi menuju tata kelola informasi yang lebih transparan dan partisipatif di Kota Serang.

Tabel 4.17 Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan Tahun 2024 s.d 2025 Kota Serang

No	Uraian	2024	2025	
			Semester I	Semester II
1	Jumlah KIM	35	54	54
2	Jumlah Kecamatan yang ada dalam kab/kota	6	67	67
3	Persentase	583.33	80.60	80.60

Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kota Serang mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2025, dari 35 menjadi 54 dan bertahan hingga akhir semester. Pertumbuhan ini mencerminkan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mendukung penyebaran informasi publik.

Jika dikaitkan dengan jumlah kecamatan yang ada, keberadaan KIM telah menjangkau sekitar 80,60% wilayah. Cakupan ini menunjukkan bahwa peran KIM semakin strategis sebagai mitra pemerintah dalam memperkuat literasi informasi serta menjaga keterbukaan layanan publik di Kota Serang.

Tabel 4.18 Cakupan layanan telekomunikasi Tahun 2024
s.d 2025 Kota Serang

No	Uraian	2024	2025	
			Semester I	Semester II
1	Luas wilayah yang tercoverage	266.74	266.74	266.74
2	Luas wilayah kelurahan	266.74	266.74	266.74
3	Persentase	100%	100%	100%

Cakupan layanan komunikasi di Kota Serang telah menjangkau seluruh wilayah kelurahan, dengan total area sebesar 266,74 km². Kondisi ini tidak mengalami perubahan dari 2024 hingga semester II tahun 2025, menunjukkan konsistensi dalam pemenuhan akses wilayah.

Dengan luas wilayah yang seluruhnya terlayani, persentase cakupan mencapai 100% pada seluruh periode pengamatan. Hal ini menandakan bahwa distribusi infrastruktur dan layanan komunikasi telah merata di seluruh kelurahan, sehingga tidak ada area yang tertinggal dalam akses informasi dan layanan komunikasi publik di Kota Serang.

Tabel 4.19 Proporsi rumah tangga dengan akses internet
Tahun 2024 s.d 2025 Kota Serang

No	Uraian	2024	2025	
			Semester I	Semester II
1	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses internet	176.538	176.538	166,835
2	Jumlah Rumah Tangga	177.028	177.028	180,949
3	Persentase	99.72	99.72	92.20

Akses internet pada tingkat rumah tangga di Kota Serang menunjukkan capaian yang cukup tinggi. Dari total lebih dari 177 ribu rumah tangga, hampir seluruhnya telah terhubung dengan layanan internet hingga tahun 2024. Persentase akses pada periode tersebut mencapai 99,72%, menandakan bahwa jaringan internet sudah menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat.

Pada semester II tahun 2025 terjadi penurunan rumah tangga yang memiliki akses internet sehingga persentasenya turun menjadi 92,20%. Meskipun masih menunjukkan mayoritas rumah tangga sudah terhubung secara digital, kondisi ini mengisyaratkan perlunya perhatian terhadap stabilitas dan pemerataan kualitas akses internet di masyarakat.

Tabel 4.20 Proporsi rumah tangga dengan akses internet
Tahun 2024 s.d 2025 Kota Serang

No	Uraian	2024	2025	
			Semester I	Semester II
1	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki komputer pribadi	062.798	062.798	72923
2	Jumlah Rumah Tangga	177.046	177.046	180949
3	Persentase	35.47	35.47	40.30

Kepemilikan komputer pribadi pada rumah tangga di Kota Serang memperlihatkan peningkatan positif. Pada tahun 2024 hingga semester I tahun 2025, persentasenya berada di angka 35,47%. Memasuki semester II tahun 2025, persentase tersebut naik menjadi 40,30%, seiring bertambahnya jumlah rumah tangga yang memiliki komputer. Kenaikan ini menunjukkan adanya peningkatan kebutuhan perangkat komputer, baik untuk aktivitas pendidikan, pekerjaan, maupun akses layanan digital di masyarakat.

Kenaikan ini mencerminkan meningkatnya kebutuhan digital dalam layanan publik, pembelajaran, dan aktivitas ekonomi. Hal tersebut mendorong lebih banyak rumah tangga memiliki komputer, sehingga tren kepemilikan diperkirakan terus bertambah.

Tabel 4.21 Presentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah Tahun 2024 s.d 2025 Kota Serang

No	Uraian	2024	2025	
			Semester I	Semester II
1	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah	21	21	31
2	Jumlah total perangkat daerah	32	32	32
3	Persentase	66%	66%	97%

Pada tahun 2024, sebanyak 21 dari 32 perangkat daerah telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah, dengan tingkat pemanfaatan sebesar 66%. Kondisi yang sama masih terjadi pada Semester I tahun 2025, di mana belum terdapat peningkatan jumlah perangkat daerah yang memanfaatkan sandi.

Namun, pada Semester II tahun 2025, terjadi peningkatan signifikan dengan 31 perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dari total 32 perangkat yang ada. Pencapaian ini menghasilkan tingkat penggunaan sebesar 97%, mencerminkan upaya intensif dalam memperkuat keamanan komunikasi antar perangkat daerah.

4.3. Analisis Berdasarkan Bidang Urusan

4.3.1. Bidang Statistik

Bidang statistik merupakan salah satu tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Serang yang berperan penting dalam mendukung perumusan kebijakan berbasis data. Melalui pengelolaan dan penyediaan data yang akurat dan terintegrasi, bidang statistik menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan yang objektif dan tepat sasaran.

Pelaksanaan tugas di bidang ini diarahkan untuk menjamin ketersediaan data sektoral yang dapat dimanfaatkan oleh perangkat daerah dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Dengan demikian, bidang statistik berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pemanfaatan data.

4.3.2. Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika

Bidang komunikasi dan informatika merupakan inti dari pelaksanaan tugas Diskominfo dalam menyediakan dan memastikan aksesibilitas layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bagi masyarakat. Berdasarkan data jaringan komunikasi, jumlah jaringan telepon genggam dan telepon stasioner di

Kota Serang pada periode 2024 hingga 2025 relatif stabil, dengan total jaringan mencapai 389 unit. Stabilitas ini menunjukkan bahwa infrastruktur dasar komunikasi masih terjaga dengan baik.

Cakupan layanan telekomunikasi juga telah menjangkau seluruh wilayah Kota Serang. Data menunjukkan bahwa 100% wilayah kelurahan di enam kecamatan telah terlayani jaringan telekomunikasi, baik pada tahun 2024 maupun 2025. Kondisi ini menjadi indikator positif dalam mendukung aktivitas komunikasi masyarakat serta penyelenggaraan layanan publik berbasis digital.

Namun demikian, apabila dilihat dari proporsi rumah tangga yang memiliki akses internet, terdapat tren penurunan yang perlu menjadi perhatian strategis. Pada tahun 2024, persentase rumah tangga dengan akses internet mencapai 99,72%, sementara pada tahun 2025 Semester II menurun menjadi 92,20%. Penurunan ini terjadi hampir di seluruh kecamatan, dengan tingkat penurunan yang relatif lebih besar di Kecamatan Curug, Kasemen, Cipocok Jaya, dan Walantaka. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya tantangan dalam pemerataan dan keberlanjutan akses internet di tingkat rumah tangga.

Selain itu, kepemilikan komputer pribadi di tingkat rumah tangga juga menunjukkan variasi yang cukup signifikan antarwilayah. Meskipun secara agregat persentase

kepemilikan komputer pribadi meningkat dari 35,47% pada tahun 2024 menjadi 40,30% pada tahun 2025, disparitas antar kecamatan masih terlihat jelas. Kecamatan Serang menunjukkan tingkat kepemilikan tertinggi, sementara Curug, Taktakan, dan Walantaka masih berada pada tingkat yang relatif rendah. Hal ini berpotensi memengaruhi kualitas pemanfaatan layanan digital, khususnya dalam konteks literasi dan produktivitas digital masyarakat.

4.4. Analisis Tren Kinerja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Salah satu pencapaian paling menonjol pada tahun 2024 adalah peningkatan indeks SPBE. Berdasarkan data historis kinerja Diskominfo Kota Serang, terlihat adanya tren kenaikan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Data Historis:



Data historis yang ditampilkan pada diagram, dapat diketahui bahwa Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Serang menunjukkan tren peningkatan yang konsisten sepanjang periode 2020 hingga 2024. Nilai indeks pada tahun 2020 tercatat sebesar 2,20, yang kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 2,28. Kenaikan ini menunjukkan adanya upaya awal pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan berbasis elektronik, meskipun peningkatannya masih relatif bertahap.

Memasuki tahun 2023, nilai Indeks SPBE Kota Serang meningkat lebih signifikan menjadi 2,95. Peningkatan ini mencerminkan adanya percepatan dalam penerapan kebijakan SPBE, baik dari sisi penguatan tata

kelola, peningkatan layanan digital, maupun integrasi sistem informasi antar perangkat daerah. Pada tahap ini, pemerintah daerah mulai menunjukkan kemajuan yang lebih nyata dalam memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana pendukung penyelenggaraan pemerintahan.

Puncak capaian terlihat pada tahun 2024, di mana Indeks SPBE Kota Serang mencapai nilai 3,62. Capaian ini tidak hanya menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi juga mencerminkan tingkat kematangan implementasi SPBE yang semakin baik. Jika dibandingkan dengan target Indeks SPBE tahun 2024 yang ditetapkan sebesar 2,80, realisasi capaian tersebut telah melampaui target secara signifikan, yaitu mencapai 129,28% dari target yang ditetapkan. Hal ini menandakan bahwa strategi dan kebijakan yang diterapkan dalam pengembangan SPBE telah berjalan secara efektif.

Lonjakan nilai indeks dari 2,95 pada tahun 2023 menjadi 3,62 pada tahun 2024 mengindikasikan adanya keberhasilan dalam beberapa aspek penting SPBE, seperti peningkatan kualitas layanan digital kepada masyarakat, penguatan kebijakan dan kelembagaan SPBE, serta peningkatan integrasi dan interoperabilitas sistem informasi antar perangkat daerah. Selain itu, peningkatan ini juga dapat mencerminkan komitmen pemerintah

daerah dalam mendorong transformasi digital secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, tren peningkatan Indeks SPBE Kota Serang selama periode 2020–2024 menunjukkan bahwa implementasi arsitektur SPBE dan integrasi layanan digital di lingkungan Pemerintah Kota Serang semakin matang dan terarah. Capaian ini menjadi indikator positif bagi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, efisiensi pelayanan publik, serta transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik. Dengan mempertahankan dan mengembangkan capaian tersebut, Pemerintah Kota Serang memiliki peluang besar untuk terus meningkatkan kualitas SPBE pada tahun-tahun berikutnya.

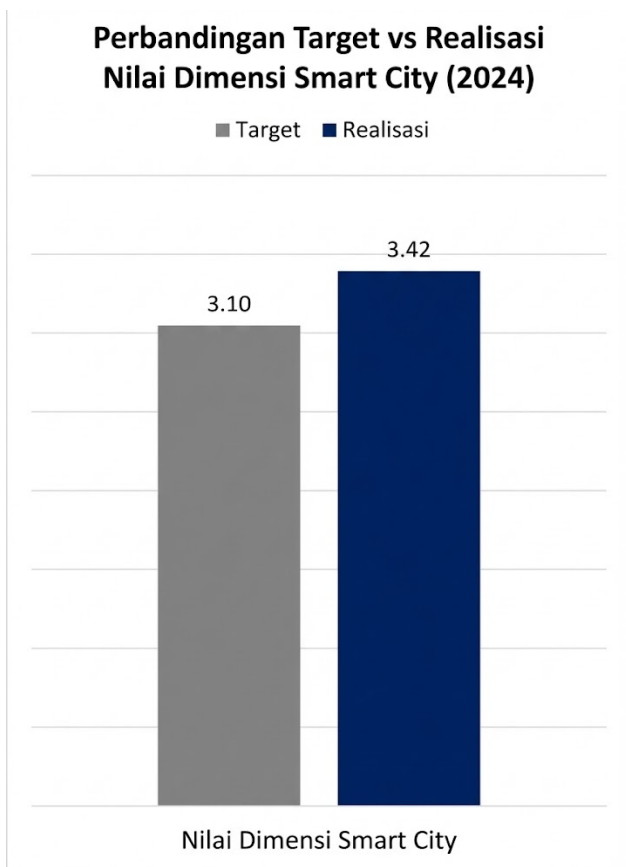
.

4.5. Evaluasi Implementasi Kota Cerdas (Smart City)

Indikator kinerja utama lainnya, yaitu Nilai Dimensi Smart City, menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dan konsisten, serta berhasil melampaui target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Capaian ini menandakan bahwa pelaksanaan program Smart City di Kota Serang telah berjalan efektif dan mampu menghasilkan kinerja yang lebih baik dari perencanaan awal. Peningkatan nilai tersebut mencerminkan keberhasilan dalam perencanaan dan implementasi

kebijakan yang berorientasi pada pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung tata kelola perkotaan.

Pertumbuhan Nilai Dimensi Smart City juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong transformasi digital melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta integrasi layanan berbasis teknologi. Capaian yang melampaui target Renstra ini memberikan dasar yang kuat bagi pengembangan inovasi dan peningkatan kualitas layanan publik, sekaligus menunjukkan arah pembangunan Smart City Kota Serang yang semakin matang dan berkelanjutan.



Analisis Tren: Nilai evaluasi Smart City menunjukkan peningkatan yang bertahap dan konsisten dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, nilai evaluasi tercatat sebesar 3,09, kemudian meningkat menjadi 3,19 pada tahun 2023, dan kembali mengalami kenaikan menjadi 3,42 pada tahun 2024. Kenaikan nilai ini mengindikasikan adanya perbaikan berkelanjutan dalam

perencanaan, pelaksanaan, serta pengelolaan program Smart City di Kota Serang.

Peningkatan nilai evaluasi tersebut mencerminkan bahwa enam dimensi Smart City, yaitu Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society, dan Smart Environment, telah diimplementasikan secara lebih terarah dan terintegrasi. Setiap dimensi menunjukkan kontribusi terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, pengembangan ekonomi berbasis inovasi, peningkatan kualitas hidup masyarakat, penguatan partisipasi sosial, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Penilaian evaluasi yang semakin tinggi dari pemerintah pusat menunjukkan bahwa kebijakan dan program Smart City yang dijalankan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata terhadap kinerja pembangunan daerah.

Secara lebih rinci, peningkatan nilai dari tahun ke tahun juga mencerminkan meningkatnya tingkat kematangan implementasi Smart City, baik dari sisi regulasi, kelembagaan, pemanfaatan teknologi informasi, maupun kolaborasi antar perangkat daerah. Tren positif ini menunjukkan bahwa arah pembangunan Smart City di Kota Serang telah berada pada jalur yang tepat dan selaras dengan kebijakan nasional. Dengan capaian tersebut, Kota Serang memiliki fondasi yang kuat untuk terus

mengembangkan inovasi berbasis teknologi serta meningkatkan kualitas layanan publik secara berkelanjutan di masa mendatang.

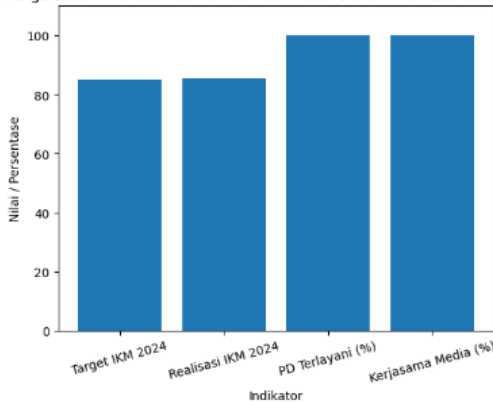
4.6. Kinerja Informasi dan Komunikasi Publik (IKP)

Dalam aspek pengelolaan informasi dan komunikasi publik, Diskominfo Kota Serang berhasil menjaga tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM): Target IKM Layanan Informasi dan Pengaduan pada tahun 2024 ditetapkan sebesar 85,00. Realisasi yang dicapai adalah 85,39. Meskipun peningkatannya tipis di atas target, hal ini menunjukkan stabilitas kualitas pelayanan informasi publik di tengah dinamika kebutuhan informasi masyarakat yang semakin kompleks.

Diseminasi Informasi: Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terlayani dalam penyebarluasan informasi mencapai 100%, serta persentase kerjasama media juga terealisasi 100%. Ini menandakan fungsi Government Public Relations (GPR) berjalan optimal dalam menjembatani informasi pemerintah kepada masyarakat.

Kinerja Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Kota Serang Tahun 2024



Kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang dilaksanakan oleh Diskominfo Kota Serang pada tahun 2024. Diagram ini menampilkan empat indikator utama, yaitu Target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Realisasi IKM, persentase Perangkat Daerah (PD) yang terlayani dalam diseminasi informasi, serta persentase kerja sama media.

Berdasarkan diagram, terlihat bahwa Realisasi IKM Tahun 2024 mencapai nilai 85,39, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 85,00. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas layanan informasi dan pengaduan publik berada pada kategori baik dan relatif stabil, meskipun dihadapkan pada dinamika kebutuhan informasi masyarakat yang semakin beragam dan kompleks.

Pada indikator diseminasi informasi, diagram menunjukkan bahwa 100% Perangkat Daerah telah terlayani dalam penyebarluasan informasi, serta kerja sama media juga terealisasi sebesar 100%. Capaian maksimal ini menandakan bahwa fungsi Government Public Relations (GPR) Diskominfo Kota Serang berjalan optimal dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan capaian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Kota Serang telah dilaksanakan secara efektif dan mendukung transparansi serta keterbukaan informasi publik.

4.7. Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Persandian

Dalam mendukung kebijakan berbasis data, Diskominfo Kota Serang telah menunjukkan kinerja yang sesuai dengan target. Pada tahun 2024, rekomendasi kegiatan statistik sektoral berhasil difasilitasi kepada 18 perangkat daerah, sejalan dengan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan komitmen Diskominfo dalam memastikan kualitas dan keselarasan data sektoral yang digunakan dalam perencanaan pembangunan.

Pada aspek keamanan informasi dan persandian, capaian kinerja menunjukkan tren yang sangat positif. Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah meningkat secara

signifikan, terutama pada tahun 2025 Semester II yang mencapai hampir seluruh perangkat daerah. Penguatan aspek persandian ini menjadi faktor pendukung utama dalam peningkatan indeks SPBE serta perlindungan data pemerintahan dari potensi ancaman siber.

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan Laporan Akhir IKP Diskominfo Kota Serang 2025, berikut ini adalah simpulan naratif dan rekomendasi strategis yang disusun berdasarkan data dan analisis kinerja yang tercantum.

1. Lonjakan Signifikan pada Kinerja SPBE dan Smart City Kinerja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Serang menunjukkan tren peningkatan yang sangat progresif. Pada tahun 2024, Indeks SPBE mencapai angka 3,62, melampaui target yang ditetapkan sebesar 2,80 dengan capaian realisasi sebesar 129,28%. Tren positif ini juga diikuti oleh evaluasi Smart City yang meraih nilai 3,42, melebihi target 3,10, yang mencerminkan kematangan implementasi tata kelola pemerintahan digital yang semakin terintegrasi dan matang.
2. Pemerataan Infrastruktur Telekomunikasi yang Optimal Infrastruktur dasar telekomunikasi di Kota Serang telah mencapai cakupan wilayah yang maksimal. Sepanjang tahun 2024 hingga 2025, 100% wilayah kelurahan di enam kecamatan telah terlayani oleh jaringan telekomunikasi. Stabilitas infrastruktur ini menjadi pondasi kuat bagi akses informasi publik, memastikan tidak ada wilayah blank spot secara administratif yang menghambat distribusi informasi di seluruh Kota Serang.

3. Fluktuasi Akses Internet Rumah Tangga dan Kesenjangan Digital Meskipun infrastruktur merata, terdapat dinamika pada tingkat pengguna. Proporsi rumah tangga dengan akses internet sempat mencapai angka sangat tinggi yaitu 99,72% pada tahun 2024. Namun, terjadi penurunan menjadi 92,20% pada Semester II Tahun 2025. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan ekonomi atau mobilitas penduduk yang memengaruhi kemampuan masyarakat mempertahankan akses internet mandiri, serta masih adanya disparitas kepemilikan perangkat komputer antar-kecamatan.
4. Penguatan Partisipasi Masyarakat Melalui KIM Peran Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) mengalami ekspansi yang masif. Jumlah KIM meningkat dari 35 kelompok pada tahun 2024 menjadi 54 kelompok pada tahun 2025. Secara kewilayahan, cakupan pemberdayaan KIM telah menjangkau 80,60% dari total kecamatan/kelurahan, yang menandakan tingginya partisipasi publik dalam diseminasi informasi, meskipun distribusi pembentukannya di awal tahun 2024 sempat tidak merata (misalnya Kecamatan Curug sempat 0%).
5. Peningkatan Keamanan Informasi dan Kepuasan Layanan Publik Aspek persandian dan keamanan informasi menunjukkan perbaikan drastis. Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan sandi/enkripsi dalam komunikasi meningkat dari 66%

menjadi 97% pada Semester II 2025, mendekati kepatuhan penuh. Di sisi layanan publik, Diskominfo berhasil menjaga kualitas layanan dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 85,39, sedikit melampaui target yang ditetapkan, serta mencapai 100% dalam pelayanan diseminasi informasi kepada Perangkat Daerah.

5.2.Saran

Berdasarkan analisis data dan tantangan yang ditemukan dalam laporan, berikut adalah saran perbaikan untuk masa mendatang:

1. Intervensi Terhadap Penurunan Akses Internet Rumah Tangga Mengingat adanya penurunan akses internet rumah tangga menjadi 92,20% pada akhir 2025, Pemerintah Kota Serang disarankan untuk mengevaluasi kebijakan penyediaan internet publik gratis (Wi-Fi Corner) di area padat penduduk atau kelurahan dengan penurunan akses tertinggi. Hal ini untuk mengantisipasi ketidakmampuan ekonomi masyarakat dalam berlangganan internet mandiri.
2. Pemerataan Kualitas dan Pembinaan KIM Meskipun jumlah KIM meningkat pesat, data awal menunjukkan adanya ketimpangan di mana kecamatan seperti Curug sempat tertinggal. Disarankan untuk melakukan standardisasi pembinaan dan "jemput bola" pembentukan KIM di wilayah yang

partisipasinya masih rendah agar tidak terjadi kesenjangan akses informasi berbasis komunitas.

3. Peningkatan Literasi Digital Produktif Tingkat kepemilikan komputer pribadi yang berfluktuasi dan relatif rendah di beberapa kecamatan (seperti Walantaka 5,60% di tahun 2024) menunjukkan akses digital masih didominasi gawai (HP). Disarankan program literasi digital tidak hanya fokus pada penggunaan media sosial, tetapi juga pelatihan kecakapan digital produktif yang dapat meningkatkan ekonomi warga, guna mendorong kebutuhan perangkat komputasi yang lebih canggih.
4. Penguatan Keamanan Siber Berkelanjutan Dengan capaian penggunaan sandi mencapai 97%, langkah selanjutnya adalah meningkatkan kualitas keamanan tersebut. Disarankan untuk mengadakan pelatihan rutin simulasi penanganan insiden siber (Cyber Drill) bagi aparaturnya pemerintahan dan audit keamanan berkala untuk mempertahankan kepercayaan publik terhadap SPBE.
5. Transformasi Media Komunikasi Publik Data menunjukkan jumlah wartel/warnet yang stagnan atau hilang, serta dominasi siaran nasional. Diskominfo disarankan untuk mengalihkan fokus dari sarana konvensional ini menuju pengembangan Community Digital Center atau pojok literasi digital yang lebih relevan dengan era smartphone, serta memperkuat

konten lokal pada kanal digital resmi pemerintah untuk mengimbangi dominasi siaran nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kota Serang. (2025). Kota Serang Dalam Angka 2025. Badan Pusat Statistik Kota Serang.
- Diskominfo Kota Serang. (2024). Data Indikator Kinerja Diskominfo Serang 2024 (IKP). Kota Serang: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang.
- Diskominfo Kota Serang. (2024). Laporan Tahunan Diskominfo Kota Serang Tahun 2024. Kota Serang: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang.
- Pemerintah Kota Serang. (2020). Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang. Kota Serang: Pemerintah Kota Serang.
- Pemerintah Kota Serang. (2025). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Serang 2025-2029. Kota Serang: Pemerintah Kota Serang.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata

Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2019). Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Neuman, W. Lawrence. (2006). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. Boston: Pearson.

Creswell, John W. (1998). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions. Thousand Oaks: Sage Publications.

Pemerintah Kota Serang. (2021). Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang Nomor: 027/SK.76-DISKOMINFO/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Diskominfo Tahun 2021. Kota Serang: Dinas Komunikasi dan Informatika.